



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG
STRATEGI SINKRONISASI PENINGKATAN KINERJA
EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF MENUJU ERA BARU
PARIWISATA DAERAH (JEMBATAN BIROKRASI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan Anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat belum selaras dengan prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan serta menyelaraskan kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka dipandang perlu menyusun dokumen strategi sinkronisasi untuk menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Jembatan Birokrasi Strategi

Sinkronisasi Peningkatan Kinerja Eksekutif dan Legislatif
Menuju Era Baru Pariwisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMDSB) Kabupaten Tabanan Tahun 2016 –2021 (Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SINKRONISASI PENINGKATAN KINERJA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF MENUJU ERA BARU PARIWISATA DAERAH (JEMBATAN BIROKRASI).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Kerja Jangka Panjang Pemerintah Daerah yang telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Semesta Berencana Provinsi Bali.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana kerja 5 (lima) tahunan Pemerintah Daerah yang telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Provinsi Bali.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah yang telah selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

10. Reses DPRD adalah kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD di daerah konstituen.
11. Pokok-pokok Pikiran DPRD adalah penelaahan kajian aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD.
12. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahunan.
13. Prioritas Pembangunan adalah strategi kebijakan yang jelas dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
14. Rencana Aksi adalah serangkaian acara tindakan, tugas atau langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan.
15. Jembatan Birokrasi adalah panduan, alur proses kerja bagi anggota DPRD dalam melaksanakan Kegiatan DPRD sehingga dalam penyerapan aspirasi masyarakat dapat lebih terarah dan terfokus untuk dapat selaras dengan kegiatan yang sudah direncanakan dalam RPJMD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN AZAS

Pasal 2

- (1) Maksud Jembatan Birokrasi Strategi Sinkronisasi Peningkatan Kinerja Eksekutif dan Legislatif Menuju Era Baru Pariwisata yaitu mensinergikan eksekutif.
- (2) Tujuan Jembatan Birokrasi Strategi Sinkronisasi Peningkatan Kinerja Eksekutif dan Legislatif Menuju Era Baru Pariwisata Daerah yaitu :
 - a. memberikan gambaran alur proses kerja Jembatan Birokrasi yang sederhana dan sistematis;
 - b. sebagai panduan bagi anggota DPRD dalam Kegiatan Reses agar penyerapan aspirasi masyarakat dapat selaras dengan RPJPD dan RPJMD;
 - c. menetapkan fokus prioritas pembangunan di masing-masing sektor yang dipetakan ke dalam wilayah administratif;
 - d. bahan pertimbangan bagi anggota DPRD dalam pembahasan RAPBD; dan

- e. bahan pertimbangan bagi anggota DPRD dalam penetapan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengolahan Data Elektronik Reses Anggota DPRD;
- b. pengolahan Data Elektronik Pokok-pokok Pikiran DPRD; dan
- c. fokus prioritas pembangunan di masing-masing sector di Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

- (1) Jembatan Birokrasi Strategi Sinkronisasi Peningkatan Kinerja Eksekutif dan Legislatif Menuju Era Baru Pariwisata Tabanan yaitu :
 - a) kebermanfaatan;
 - b) kebersamaan;
 - c) keterpaduan;
 - d) keterbukaan; dan
 - e) keberlanjutan.
- (2) Asas Kebermanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu segala aktifitas yang direncanakan dan dilaksanakan mampu memberi manfaat kepada masyarakat;
- (3) Asas Kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu asas yang mendorong seluruh stakeholder untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan daerah;
- (4) Asas Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, baik keterkaitan antar pelaksana maupun keterkaitan manfaat;
- (5) Asas Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu seluruh proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan secara transparan;
- (6) Asas Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu kebijakan dirumuskan dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan,

nilai- nilai adat/budaya, serta dapat berlangsung secara berkesinambungan.

BAB III SASARAN

Pasal 5

Sasaran pelaksanaan Jembatan Birokrasi Strategi Sinkronisasi Peningkatan Kinerja Eksekutif dan Legislatif Menuju Era Baru Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Penyerapan aspirasi masyarakat (reses);
- b. Penelaahan kajian aspirasi masyarakat (pokir);
- c. Pembahasan RAPBD; dan
- d. Perumusan kebijakan legislatif.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengolahan Data Elektronik Reses Anggota DPRD meliputi :
 - a. sistem aplikasi dimaksud dalam ayat (1) diintegrasikan dengan system perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
 - b. sistem pengolahan Data Elektronik Reses Anggota DPRD:
 1. Reses DPRD dilaksanakan secara elektronik dengan mengimplementasikan aplikasi e-Reses;
 2. Sekretariat DPRD selaku administrator dalam aplikasi e-Reses;
 3. Anggota DPRD selaku *user/klien* dalam aplikasi e-Reses;
 - c. dokumen laporan reses DPRD merupakan keluaran dari aplikasi e-Reses sebagai masukan penetapan Pokok-pokok Pikiran DPRD
- (2) Bupati cq. Sekretariat DPRD dapat membangun suatu sistem aplikasi on-line Jembatan Birokrasi untuk mempermudah masyarakat menyalurkan aspirasinya.

Pasal 7

Pengolahan Data Elektronik Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD meliputi :

- a. pokok-pokok Pikiran DPRD dilaksanakan secara elektronik dengan mengimplementasikan aplikasi e-Pokir;
- b. sekretariat DPRD selaku administrator dalam aplikasi e-Pokir;
- c. anggota DPRD selaku user/klien aplikasi e-Pokir ;
- d. dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan keluaran dari aplikasi e-Reses sebagai masukan dalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah dan Penyusunan RAPBD.

BAB V

FOKUS PRIORITAS

Pasal 8

Fokus prioritas pembangunan di masing-masing sector di Kabupaten Tabanan, dikelompokkan dalam 4 (empat) daerah pemilihan dan 10 (sepuluh) kecamatan yaitu:

- a. Daerah Pemilihan I :
 1. Kecamatan Tabanan
 2. Kecamatan Kerambitan
- b. Daerah Pemilihan II :
 1. Kecamatan Kediri
 2. Kecamatan Marga
- c. Daerah Pemilihan III :
 1. Kecamatan Baturiti
 2. Kecamatan Penebel
- d. Daerah Pemilihan IV :
 1. Kecamatan Selemadeg Timur
 2. Kecamatan Selemadeg
 3. Kecamatan Selemadeg Barat
 4. Kecamatan Pupuan

Pasal 9

Dokumen Jembatan Birokrasi Strategi Sinkronisasi Peningkatan Kinerja Eksekutif dan Legislatif Menuju Era Baru Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan pada
tanggal 24 September 2019

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG
STRATEGI SINKRONISASI PENINGKATAN
KINERJA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF
MENUJU ERA BARU PARIWISATA
TABANAN (JEMBATAN BIROKRASI)

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Tabanan terletak di bagian selatan pulau Bali yang secara geografis berada pada posisi 8014' 30"80 30'07" Lintang Selatan, 1140 54'52"115012'57" Bujur Timur. Luas Kabupaten Tabanan adalah sebesar 839.33 Km² atau 14,90 persen dari luas Provinsi Bali (5.632,86 Km²). Berdasarkan besarnya wilayah, maka Kabupaten Tabanan termasuk Kabupaten terbesar kedua di Provinsi Bali setelah Kabupaten Buleleng. Secara administratif Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan yang terdiri dari 133 desa dinas, 344 desa pekraman dan 816 banjar adat.

Kabupaten Tabanan memiliki potensi pertanian dan pariwisata sebagai sektor utama dalam menunjang pembangunan daerah. Dalam upaya meningkatkan potensi yang ada tersebut diperlukan dukungan dan peran serta pemerintah daerah dengan melakukan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan daerah dapat membantu terwujudnya pembangunan yang terarah dan berkesinambungan demi kesejahteraan bersama. Untuk itu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibuat oleh pemerintah daerah dan disahkan melalui rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sehingga yang tertuang dalam rencana pembangunan tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama dan menjadi acuan yang jelas dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Perangkat Daerah menjalankan pembangunan dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan, dan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam mewujudkan tugas dan fungsi anggota dewan secara maksimal dan optimal, salah satu strategi yang dilakukan DPRD adalah dengan penyerapan aspirasi

masyarakat melalui kegiatan Reses DPRD. Kegiatan Reses dalam 1 (satu) tahun terdapat 3 (tiga) masa persidangan yang diakhiri dengan reses oleh masing-masing anggota DPRD yang terbagi dimasing-masing Daerah Pemilihan. Hasil penyerapan aspirasi tersebut nantinya tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang akan disampaikan pada eksekutif, pembahasan anggaran pada penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta dituangkan dalam pembahasan kebijakan/ peraturan daerah. Dalam kenyataannya selama ini arah atau tujuan dari legislatif dalam hal ini DPRD dan Eksekutif mengalami perbedaan pandangan pelaksanaan dalam konteks arah pembangunan, sehingga terjadinya ketidakselarasan antara perencanaan program prioritas pembangunan dengan pokok-pokok pikiran DPRD, Rancangan APBD dan legislasi. Hal ini terjadi dikarenakan rendahnya sinergitas dan harmonisasi kinerja pembangunan daerah (eksekutif) dengan target kinerja DPRD (legislatif).

Melihat masih rendahnya sinergitas dan harmonisasi kedua lembaga tersebut maka perlu upaya inovatif untuk dapat meningkatkan kinerja Eksekutif dan Legislatif. Strategi ini didesain dengan nama “Jembatan Birokrasi”, yaitu membangun strategi sinkronisasi peningkatan kinerja Eksekutif dan Legislatif menuju era baru pariwisata Tabanan. Pada “Jembatan Birokrasi” ini akan diberikan panduan, alur proses kerja bagi anggota DPRD dalam melaksanakan Kegiatan Reses sehingga dalam penyerapan aspirasi masyarakat dapat lebih terarah dan terfokus untuk dapat selaras dengan kegiatan yang sudah direncanakan dalam RPJMD. Dengan terwujudnya perubahan ini, kondisi yang diharapkan adalah optimalisasi sinergi dan harmonisasi kinerja pembangunan daerah (Eksekutif) dengan target kinerja DPRD (Legislatif). Untuk mengakselerasi implementasi “Jembatan Birokrasi, akan dituangkan dalam Dokumen Strategi Sinkronisasi Peningkatan Kinerja Eksekutif dan Legislatif menuju Era Baru Pariwisata Tabanan. Dokumen ini akan menjadi pedoman pelaksanaan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Dalam dokumen “Jembatan Birokrasi” mencerminkan secara keseluruhan tahapan proses perencanaan jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD). Disamping itu, dijelaskan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi focus dalam setiap sector perencanaan pembangunan sesuai visi misi Tabanan Serasi. Sector-sektor yang menjadi permasalahan dan capaian masing-masing sector. Hal ini akan mengungkapkan apa yang perlu ditekankan oleh DPRD pada setiap wilayahnya dan hal-hal apa saja yang harus kerjakan untuk pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dokumen ini

menjadi pegangan dalam pelaksanaan tugas DPRD. Pola yang disusun dalam dokumen ini merupakan pola yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh eksekutif sehingga diharapkan selaras dan sejalan dengan kinerja legislative.

Berikut disajikan tahapan dalam penyusunan dokumen sampai pada strategi pelaksanaan “Jembatan Birokrasi”.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen “Jembatan Birokrasi” dimaksudkan sebagai alat bantu yang dapat digunakan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan “Jembatan Birokrasi”. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dengan disusunnya dokumen ini, adalah:

1. Memberikan gambaran alur proses kerja “Jembatan Birokrasi” yang sederhana dan sistematis.
2. Sebagai panduan bagi anggota DPRD dalam Kegiatan Reses agar penyerapan aspirasi masyarakat dapat selaras dengan RPJPD dan RPJMD.
3. Menetapkan fokus prioritas pembangunan di masing-masing sektor yang dipetakan ke dalam wilayah administratif.
4. Bahan pertimbangan bagi anggota DPRD dalam pembahasan RAPBD.
5. Bahan pertimbangan bagi anggota DPRD dalam penetapan peraturan daerah.

1.3 RUANG LINGKUP

Penyusunan Dokumen “Jembatan Birokrasi” dengan ruang lingkup:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
4. Pengolahan Data Elektronik Reses Anggota DPRD.
5. Pengolahan Data Elektronik Pokok-pokok Pikiran DPRD.
6. Fokus prioritas pembangunan di masing-masing sector di Kabupaten Tabanan.

2. PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan jabaran dari tujuan pembangunan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan untuk masa waktu 20 tahun kedepan, yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Sasaran dan arah pembangunan akan ditetapkan dalam empat periode dan setiap periode mencakup waktu lima tahun.

Visi Pembangunan Kabupaten Tabanan pada tahun 2005-2025 adalah:

“TABANAN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN“

Visi pembangunan daerah 2005-2025 ini searah dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Kesejahteraan masyarakat dengan ditopang oleh sektor pertanian merupakan kata kunci dari visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tabanan.

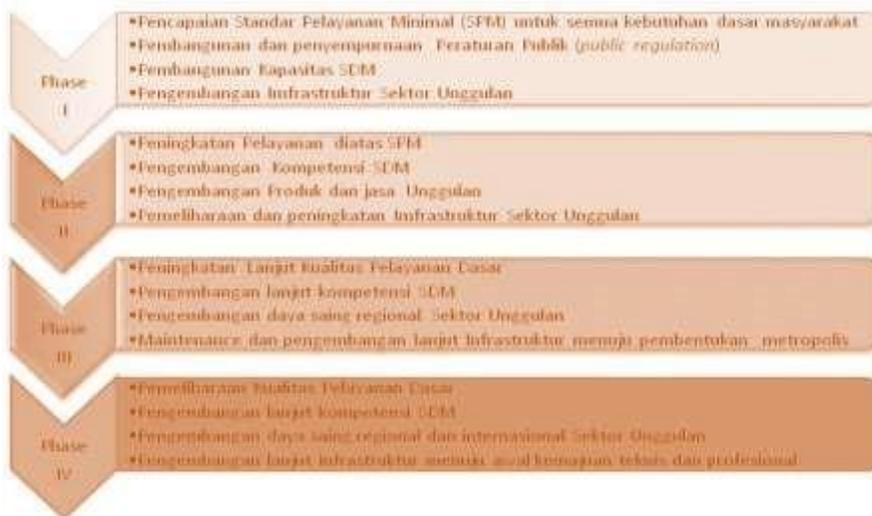
Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tersebut, dijabarkan dan dicapai melalui 6 (enam) Misi Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, produktif, dan religius. Misi ini ditempuh melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan dan urusan pemerintahan daerah.
2. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan.
3. Mewujudkan pertanian yang tangguh. Pertanian yang tangguh dicirikan oleh produk yang dihasilkan memiliki daya saing komparatif dan kompetitif.
4. Menjadikan Kabupaten Tabanan sebagai pusat Agrowisata Provinsi Bali. Agrowisata atau agroturisme adalah sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian.
5. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan membentuk sistem pemerintahan yang baik (good government).

6. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk lokal daerah.

Dalam pencapaian arah RPJPD Kabupaten Tabanan 2005 - 2025 di atas diklasifikasi menjadi empat (4) kali periode pemerintahan kepala daerah, yaitu dalam kurun waktu lima (5) tahunan dengan arah pembangunan dalam 4 phase: Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun Pertama (2005 – 2010), Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun Kedua (2011 – 2015), Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun Ketiga (2016 – 2020) dan Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun Keempat (2021 – 2025).

Tahapan RPJPD Kabupaten Tabanan 2005 - 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



2.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Sesuai dengan pentahapan pembangunan lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025, **RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021** merupakan tahapan pembangunan lima tahunan periode ketiga. Periode ketiga ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berbasis pertanian, pariwisata budaya, dan kelestarian fungsi lingkungan dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang sehat dan kompetitif.

Sebagaimana tujuan jangka panjang pembangunan Tabanan dan potensi daerah, maka pembangunan pertanian perlu diarahkan untuk mendorong terciptanya peningkatan pendapatan petani, membuka kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan serta mampu bersaing di pasar global dalam rangka menghadapi perdagangan bebas ASEAN (MEA), oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan harus merubah paradigma yang ada saat ini dan

mengarahkan seluruh sumberdaya untuk pembangunan sektor pertanian yang tangguh dan modern sehingga mendorong terwujudnya industri pertanian di Kabupaten Tabanan.

Dijadikannya Tabanan sebagai lumbung pangan Bali tidak sebatas slogan semata, perlu dukungan dan komitmen semua pihak untuk membangun pertanian di Kabupaten Tabanan. Selain tantangan sektor pertanian, persaingan di era global tidak dapat dihindari. Oleh karena itu kesiapan Sumber Daya Manusia yang unggul, berkarater dan berbudaya menjadi prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Tabanan lima tahun yang akan datang. Konsep pembangunan ini berbasis pada ajaran Trisakti yaitu berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian di bidang kebudayaan dengan memfokuskan pada lima bidang prioritas yaitu 1). Bidang sandang, pangan dan papan; 2). Pendidikan dan kesehatan; 3) tenaga kerja dan jaminan sosial; 4). Adat, agama dan budaya; 5) pariwisata. Kelima bidang prioritas tersebut ditopang dengan Bidang Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan.

VISI

Visi dan misi RPJMD periode 2016-2021 merupakan visi dan misi pemimpin daerah terpilih. Sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, maka visi RPJMD tahun 2016-2021 adalah :

“TABANAN SERASI”

(SEJAHTERA, AMAN, DAN BERPRESTASI)

Visi Tabanan Serasi 2016-2021 (disebut dengan Jilid II) merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya (disebut dengan Jilid I) dengan semangat baru dan landasan yang lebih kuat. Semangat baru yaitu menjalankan ajaran **Tri Sakti**, memperkuat landasan yaitu dengan menggali konsep-konsep dasar pembangunan dari para pendiri bangsa melalui **“Pembangunan Semesta Berencana”**, dan memperhatikan agenda perencanaan pembangunan nasional melalui **“Nawacita”**.

Makna Tabanan Sejahtera, Aman, dan Berprestasi (Jilid II) ini pun dijabarkan secara lebih luas dari makna periode sebelumnya, sehingga menjadi:

1. Kata “SERASI” sendiri diartikan sebagai: keselarasan atau keseimbangan atau keharmonisan antara unsur-unsur material – spiritual, fisik – non fisik, kota – desa, intelektual - budi pakerti, laki – perempuan, dan lainlain agar tercipta kondisi masyarakat yang tenteram dan damai;

2. SEJAHTERA adalah terwujudnya peningkatan kondisi ekonomi dan daya beli, derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan life-skill masyarakat Tabanan sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik;
3. AMAN adalah terjaminnya rasa aman masyarakat dan dunia usaha yang ditandai dengan terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam pencapaian kesejahteraannya melalui penguatan di bidang hukum, peningkatan mutu pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan (good governance);
4. BERPRESTASI adalah terwujudnya rasa bangga sebagai masyarakat Tabanan melalui pencapaian prestasi oleh seluruh pelaku pembangunan di Tabanan di berbagai kancah penggalangan prestasi lingkup regional, nasional atau internasional. Pelaku pembangunan yang dimaksud adalah perempuan dan pemuda, pendidik, paramedis, petani, peternak, nelayan, pengerajin, budayawan, olahragawan, dunia usaha, penyelenggara pemerintahan, sekeha/keleompok tradisional, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

MISI

Capaian dan prestasi pembangunan yang telah dicapai dalam periode 2011–2015 tetap harus dipelihara dan dilanjutkan dalam pembangunan lima tahun ke depan. Atas dasar evaluasi kekurangan dan kelemahan pencapaian Visi Tabanan Serasi periode sebelumnya, serta atas dasar analisis isu strategis, tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam rencana pembangunan 2016–2021 maka visi Tabanan Serasi (jilid II) akan menempuh 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membentuk SDM yang berkualitas, berbudaya, dan berkeadilan sosial.
 - a. Membentuk SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang memiliki karakter jujur, kreatif dan mandiri, serta menjunjung dan melestarikan nilai-nilai budaya Bali seperti: *tat twam asi* (empati), keselarasan/keharmonisan, gotong royong, dan lain-lain.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan prima
 - a. Menyediakan akses kepada semua warga untuk mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas;

- b. Membangun kebiasaan masyarakat yang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan pangan sehat/gizi seimbang.
3. Menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata
 - a. Memperkuat ekonomi Tabanan dengan pelibatan masyarakat lokal seluasluasnya untuk menggarap potensi unggulan di setiap wilayah;
 - b. Mensinergikan pembangunan pertanian dengan pariwisata agar pariwisata berkontribusi positif terhadap kesejahteraan petani dan tidak menjadi ancaman bagi terwujudnya pertanian berkelanjutan;
 - c. Menciptakan nilai tambah terhadap produksi pertanian sehingga pertanian semakin diminati dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat pedesaan.
4. Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan infrastruktur.
 - a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong dan melancarkan interaksi ekonomi, sosial, dan budaya;
 - b. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, mengacu tata ruang dan ramah lingkungan;
 - c. Menggalang partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya.
5. Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan dan berdaya saing berbasis teknologi informasi.
 - a. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, efektif dan efisien;
 - b. Memperkuat sistem dan prosedur perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
 - c. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kompetensi pejabat;
 - d. Menata ulang organisasi perangkat daerah, TUPOKSI dan sistem rotasi/mutasi pegawai.

Tujuan dan Sasaran pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil analisis isu-isu strategis daerah. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tabanan 2016–2021 maka disusun tujuan dan sasaran lima tahun ke depan sebagai berikut:

Misi 1. Membentuk SDM yang berkualitas, berbudaya dan berkeadilan sosial, dengan tujuan:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran:

- a. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;
 - b. Meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga;
 - c. Meningkatnya kualitas penanganan kependudukan.
2. Peningkatan nilai – nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat dengan sasaran:
- a. Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya lokal
3. Peningkatan pemenuhan perlindungan sosial dengan sasaran:
- a. Menurunnya angka kemiskinan;
 - b. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - c. Meningkatkan perlindungan terhadap keamanan dan ketertiban;
 - d. Meningkatnya keterampilan usia produktif;
 - e. Meningkatnya penanganan PMKS.

Misi 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan prima, dengan tujuan:

1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya upaya kesehatan perorangan;
 - b. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan sasaran:
 - a. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima;
 - b. Terselenggaranya pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM.

Misi 3. Menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata, dengan tujuan:

1. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya produksi pertanian yang berdaya saing;
 - b. Berkembangnya usaha – usaha pengolahan dan pemasaran pertanian;
 - c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian.
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pariwisata dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata.

Misi 4. Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan infrastruktur, dengan tujuan:

1. Mempercepat pengembangan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, dengan sasaran:
 - a. Tumbuhnya generator ekonomi baru sesuai penataan ruang;

- b. Berkembangnya pusat – pusat pertumbuhan berwawasan lingkungan;
- c. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana penunjang pusat – pusat pertumbuhan.

Misi 5. Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, dan berdaya saing berbasis teknologi informasi, dengan tujuan:

- 1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas instansi pemerintah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tujuan dijabarkan menjadi sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Tabanan 2016-2021 sesuai misi yang telah ditetapkan di atas.

2.3 TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan Perencanaan Pembangunan Tahunan dari RPJMD Kabupaten Tabanan sebagaimana amanat Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD akan dicapai dengan merumuskan rencana-rencana strategis pembangunan daerah.

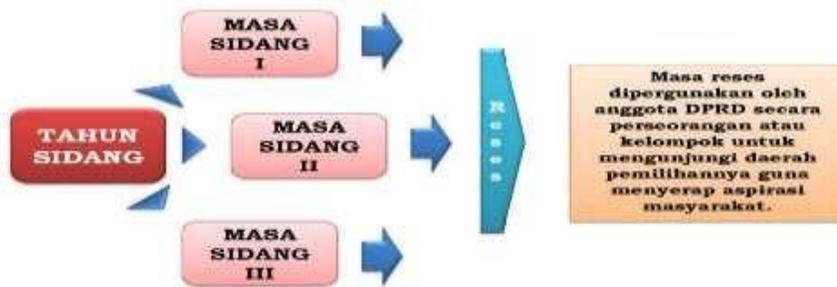
RKPD disusun dengan pola pendekatan “*THIS*” (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial) dengan mengakomodir seluruh pemangku kepentingan. Untuk mengakomodir pemangku kepentingan tersebut digunakan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses yaitu :*Teknokratik, Partisipatif, Politis, Top Down & Bottom Up*.

2.3.1 PENGELOLAAN RESES DAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut anggota DPRD menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Anggota DPRD menyiapkan Laporan Reses yang akan disampaikan dalam Paripurna. Pada Paripurna tersebut dirumuskan Pokok-pokok Pikiran DPRD yang akan menjadi masukan bagi Eksekutif dalam menyusun Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahunan / RKPD.



Perencanaan Pembangunan Daerah secara politis DPRD melaksanakan reses untuk menjaring permasalahan yang ada di daerah konstituen-nya. Hasil dari reses DPRD tersebut dituangkan dalam **Dokumen Hasil Reses DPRD**. Melalui Rapat Pleno, Anggota DPRD membahas usulan aspirasi Anggota DPRD sebagai masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Usulan aspirasi tersebut dituangkan sebagai **Dokumen Popok-Pokok Pikiran DPRD**, yang disampaikan kepada *Eksekutif* melalui Bapelitbang untuk menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah.

Sebagai panduan bagi Anggota DPRD dalam pelaksanaan reses dan menyampaikan Pokok-pokok Pikiran DPRD telah dibangun Aplikasi Elektronik **e-Reses dan e-Pokir** untuk kelancaran panduan yang jelas bagi anggota dewan. Pada Aplikasi telah jelas memetakan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Aplikasi **e-Reses dan e-Pokir** dapat diakses oleh anggota DPRD dengan IDE user yang telah teregistrasi dalam aplikasi.

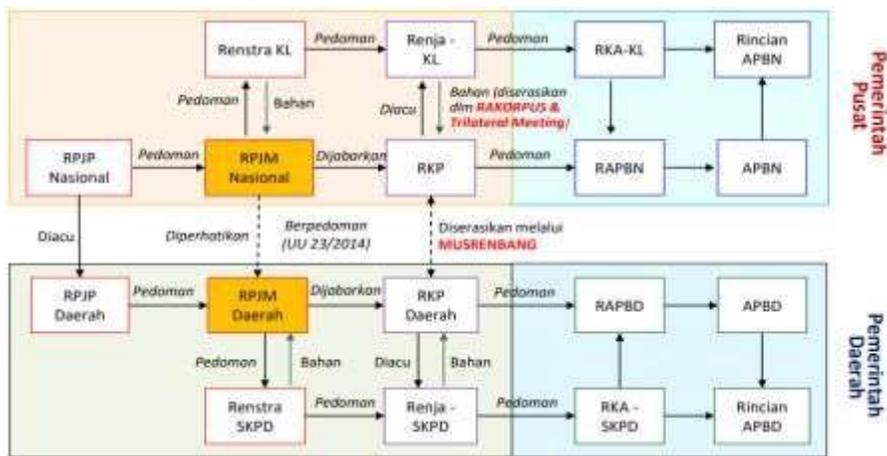
2.3.2 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 178, disebutkan Kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses, Pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran, hasil telaahan Pokir DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, Pokir DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Proses penyusunan RKPD dengan menyerap aspirasi Anggota DPRD dapat dilihat pada bagan alir berikut ini:



Berikut hubungan / bagan alir proses RPJP sampai penetapan APBD dapat dilihat pada bagan berikut:



Berikut *timeline* pelaksanaan masa reses Anggota DPRD sampai penetapan APBD dapat dilihat pada bagan berikut:



3. FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN

3.1 Sektor Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor kunci dari proses terwujudnya manusia unggul yang memiliki daya saing sebagaimana diidam-idamkan oleh banyak negara, termasuk negara kita. Pemerintah memiliki peran yang sangat menentukan dalam pencapaian peningkatan akses dan mutu pendidikan untuk seluruh warga negaranya. Pemerintah Kabupaten/kota memiliki kewenangan pada jenjang pendidikan usia dini (PAUD), pendidikan SD dan SMP, serta pendidikan kesetaraan bagi anak-anak yang putus sekolah.

3.1.1 Pendidikan Paud

PAUD/TK merupakan bentuk pendidikan formal bagi anak usia dini yang memasuki usia 4-6 tahun, sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Pendidikan prasekolah ini membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan sehingga siap melanjutkan kejenjang pendidikan dasar.

Jumlah siswa TK di Kabupaten Tabanan pada Tahun Pelajaran 2018/2019 sebanyak 6.628 orang yang terdiri dari 3.426 orang siswa laki-laki dan 3.202 orang siswi perempuan. Jumlah siswa TK terbanyak ada di Kecamatan Tabanan (1.989 orang). Kalau kita bandingkan antara jumlah siswa dengan jumlah penduduk usia 4-6 tahun, diperoleh angka partisipasi PAUD di Kabupaten Tabanan. Jumlah penduduk usia 4-6 tahun tahun 2019 tercatat sebanyak 11.098 jiwa sehingga angka partisipasi PAUD diperkirakan sebesar 77,80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 22,2 persen anak 4-6 tahun di Kabupaten Tabanan yang tidak menikmati PAUD. Kepesertaan PAUD sangat bervariasi antar kecamatan, dengan angka partisipasi terendah terdapat di Kecamatan Selemadeg Barat (34,25 persen), Selemadeg Timur (45,66 persen), Baturiti (50,36 persen), dan Marga (57,35 persen).

Jumlah PAUD di Kabupaten Tabanan tercatat sebanyak 235 TK, yang terdiri dari 11 TK Negeri dan selebihnya adalah sekolah swasta yang dikelola yayasan. PAUD yang sarana dan prasarananya dalam katagori baik diperkirakan sebanyak 148 sekolah (62,98 persen). Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, maka seluruh anak 4-6 tahun harus terlayani

PAUD. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Tabanan masih memiliki PR yang sangat berat untuk memenuhi ketentuan SPM.

Dari sisi jumlah, keberadaan PAUD di Kabupaten Tabanan dapat dikatakan cukup memadai, bahkan jumlah TK (235) sudah melebihi jumlah desa (133). Namun, dari sisi standar sarana dan prasarana serta dukungan guru pada jenjang PAUD masih jauh dari standar yang ditetapkan dalam SPM. Masih rendahnya APK PAUD di Tabanan perlu dilakukan upaya keras untuk mewajibkan orang tua menyekolahkan anaknya sebelum memasuki jenjang pendidikan SD.

3.1.2 Pendidikan Sekolah Dasar

Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) partisipasi anak usia 7-12 tahun dapat dikatakan telah mencapai kondisi yang ideal. Walaupun demikian, Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mampu menjamin tidak seorangpun anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah serta anak yang terlanjur putus sekolah harus mendapat pendidikan kesetaraan. Untuk menemukan siapa yang tidak bersekolah dan siapa anak yang mengalami putus sekolah, mesti disiapkan suatu system pendataan yang terintegrasi, baik lintas sektor maupun antar jenjang (dusun, desa, kecamatan, dan kabupaten).

Standar Nasional Pendidikan (SNP) menetapkan 8 (delapan) standar mutu pendidikan, yaitu: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan. Capaian SNP jenjang SD Kabupaten Tabanan menunjukkan capaian yang rendah pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Standar Sarana dan Prasarana.

Dari 324 jumlah SD dan 1.934 rombongan belajar (rombel) yang ada di Kabupaten Tabanan mestinya tersedia guru sebanyak 2.896 guru. Namun, saat ini ketersediaan guru SD hanya sebanyak 2.438 guru (minus 458 orang). Dari jumlah guru yang ada ini pun 20,4 persen berstatus sebagai guru kontrak (non PNS). Di samping kekurangan dari sisi jumlah, keberadaan guru mata pelajaran wajib (guru Agama dan Panjaskes) juga sangat terbatas. Sebaran guru antar kecamatan juga mengalami ketimpangan. Kecamatan yang paling besar kekurangan guru adalah berturut-turut adalah Kecamatan Baturiti, Kediri, dan Penebel (Tabel 3.1). Jadi, kekurangan guru SD tidak hanya terjadi di sekolah yang jauh dari kota namun juga terjadi di perkotaan (Kecamatan Kediri).

Tabel 3.1. Ketersediaan Guru pada Janjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tabanan Tahun 2018

| No | Kecamatan | Jumlah SD | Jumlah Rombongan Belajar | Guru Berstatus | | Jumlah Guru | Kebutuhan | Kekurangan Guru |
|---------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | PNS | Kontrak | | | |
| 1 | Baturiti | 35 | 215 | 148 | 39 | 187 | 322 | 135 |
| 2 | Kerambitan | 31 | 184 | 201 | 49 | 250 | 277 | 27 |
| 3 | Kediri | 45 | 288 | 258 | 59 | 317 | 426 | 109 |
| 4 | Marga | 34 | 203 | 220 | 48 | 268 | 305 | 37 |
| 5 | Penebel | 44 | 261 | 274 | 51 | 325 | 393 | 68 |
| 6 | Pupuan | 31 | 186 | 243 | 56 | 299 | 279 | +20 |
| 7 | Selemadeg Barat | 20 | 116 | 101 | 26 | 127 | 176 | 49 |
| 8 | Selemadeg | 17 | 102 | 87 | 37 | 124 | 153 | 29 |
| 9 | Selemadeg Timur | 20 | 120 | 124 | 38 | 162 | 180 | 18 |
| 10 | Tabanan | 47 | 259 | 284 | 95 | 379 | 385 | 6 |
| Jumlah | | 324 | 1.934 | 1.940 | 498 | 2.438 | 2.896 | |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tabanan, 2018

Di samping akses pendidikan dan ketersediaan guru, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang serius terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Dari seluruh sarana dan prasarana pendidikan yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, ruang kelas merupakan prasarana yang paling utama sebagai penunjang kegiatan belajar-mengajar. Sampai saat ini dapat dilihat bahwa 23,37 persen kondisi ruang belajar SD yang ada masih dalam kondisi rusak berat. Ruang belajar SD di Kecamatan Marga, Selemadeg Timur, Selemadeg Barat, Selemadeg, Pupuan dan Penebel wajib mendapat prioritas penanganan dibandingkan dengan SD di kecamatan lainnya (Tabel 3.2).

Tabel 3.2. Kondisi Ruang Belajar SD di sepuluh Kecamatan Kabupaten Tabanan Tahun 2018

| No | Kecamatan | Jumlah SD | Jumlah Ruang Belajar | Kondisi Ruang Kelas | | | Persentase Ruang Belajar Rusak Berat |
|---------------|-----------------|------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |
| 1 | Baturiti | 35 | 210 | 71 | 134 | 5 | 2,38 |
| 2 | Kerambitan | 31 | 192 | 77 | 111 | 4 | 2,08 |
| 3 | Kediri | 45 | 282 | 124 | 149 | 9 | 3,19 |
| 4 | Marga | 34 | 201 | 72 | 109 | 20 | 9,95 |
| 5 | Penebel | 44 | 269 | 91 | 165 | 13 | 4,83 |
| 6 | Pupuan | 31 | 190 | 62 | 118 | 10 | 5,26 |
| 7 | Selemadeg Barat | 20 | 130 | 36 | 89 | 5 | 3,85 |
| 8 | Selemadeg | 17 | 108 | 25 | 76 | 7 | 6,48 |
| 9 | Selemadeg Timur | 20 | 122 | 68 | 46 | 8 | 6,56 |
| 10 | Tabanan | 47 | 368 | 118 | 245 | 5 | 1,36 |
| Jumlah | | 324 | 2.072 | 744 | 1.242 | 86 | 4,15 |

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Tabanan Tahun 2018

3.1.3 Pendidikan Menengah Pertama

Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hampir sama dengan jenjang SD, yakni pencapaian yang rendah pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Standar Sarana dan Prasarana. Pencapaian yang rendah pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan terjadi akibat dari: ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan, ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi, ketersediaan tenaga laboratorium, serta ketersediaan tenaga dan kompetensi tenaga pustakawan.

Berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan SMP, kondisinya kondisinya relatif lebih baik dibandingkan dengan jenjang pendidikan SD. Ruang belajar yang rusak berat masih ada sebanyak 18 unit atau 3,12 persen dari ruang yang ada (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Kondisi Ruang Belajar SMP di sepuluh Kecamatan Kabupaten Tabanan Tahun 2018

| No | Kecamatan | Jumlah SMP | Jumlah Ruang Belajar | Kondisi Ruang Kelas | | | Persentase Ruang Belajar Rusak Berat |
|---------------|-----------------|------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |
| 1 | Baturiti | 5 | 66 | 36 | 23 | 7 | 10,61 |
| 2 | Kerambitan | 2 | 46 | 21 | 25 | 0 | 0,00 |
| 3 | Kediri | 4 | 72 | 38 | 34 | 0 | 0,00 |
| 4 | Marga | 4 | 64 | 19 | 45 | 0 | 0,00 |
| 5 | Penebel | 3 | 46 | 22 | 22 | 2 | 4,35 |
| 6 | Pupuan | 6 | 60 | 29 | 29 | 2 | 3,33 |
| 7 | Selemadeg Barat | 2 | 17 | 2 | 10 | 5 | 29,41 |
| 8 | Selemadeg | 2 | 32 | 4 | 26 | 2 | 6,25 |
| 9 | Selemadeg Timur | 3 | 48 | 36 | 12 | 0 | 0,00 |
| 10 | Tabanan | 5 | 125 | 43 | 82 | 0 | 0,00 |
| Jumlah | | 36 | 576 | 250 | 308 | 18 | 3,13 |

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Tabanan Tahun 2018

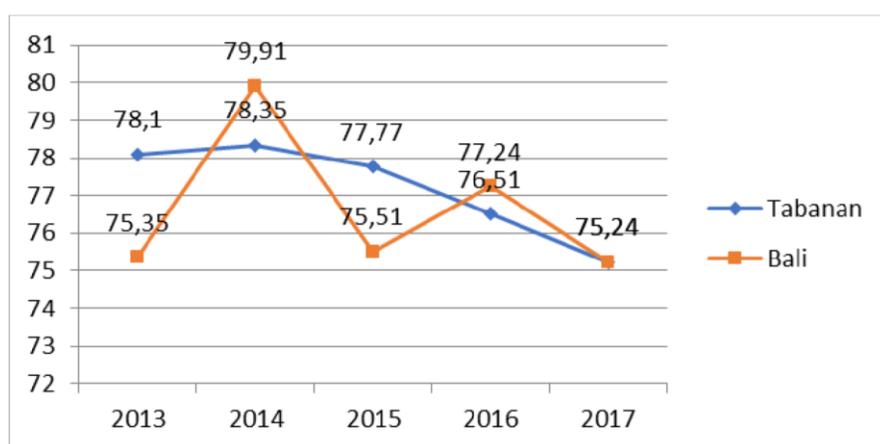
Dari table di atas dapat disimak, bahwa ruang belajar SMP di Kecamatan Selemadeg Barat, Baturiti, Tabanan, Kediri dan Selemadeg butuh penanganan yang lebih prioritas dalam rangka menyediakan sarana dan prasara belajar yang representatif di seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan. Demikian pula perhatian khusus perlu diberikan pada SMPN 6 Tabanan dan SMPN 5 Kediri sebagai sekolah baru agar sekolah ini mampu memberikan pelayanan yang setara dengan sekolah-sekolah lainnya.

3.2 Sektor Kependudukan

3.2.1 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tabanan dapat dikaji dari dua indikator penting, yaitu: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran.

Kontribusi penduduk usia kerja dalam perekonomian dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan menganggur) terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dihitung sebagai nilai TPAK. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK penduduk Kabupaten Tabanan tahun 2017 tercatat sebesar 75,24 persen mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 sebesar 77,77 persen. Perkembangan kondisi TPAK penduduk Tabanan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



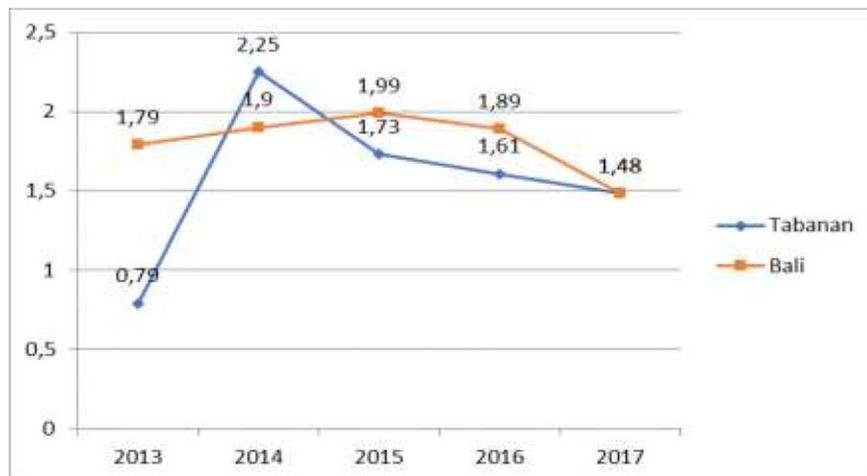
Gambar 3.1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Kabupaten Tabanan Tahun 2013 – 2017

TPAK Bali dan Tabanan tergolong tinggi, artinya ketersediaan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa relatif tinggi. Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut di atas mengindikasikan kita sudah masuk dalam bonus demografi. Jika bonus demografi ini bisa digarap dan dimanfaatkan secara baik, maka peluang meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah akan terbuka lebar. Sebaliknya, jika kualitas tenaga kerja yang tersedia rendah dan iklim usaha tidak tumbuh dengan baik maka bonus demografi ini akan berdampak buruk pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Gambaran lain dari kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Tabanan dapat dilihat dari tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dihitung dari persentase penduduk angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.

Tingkat Pengangguran di Kabupaten Tabanan dalam beberapa kurun waktu, terhitung relatif rendah. Tahun 2017, tingkat pengangguran tercatat sebesar 1,48 persen dari jumlah angkatan kerja yang berjumlah 2.434.450 orang. Pencapaian tingkat pengangguran di bawah 1,5 persen ini merupakan angka minimal yang sulit untuk diturunkan lagi.



Gambar 3.2

Perkembangan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Tabanan

Kondisi di atas sekilas nampak cukup membanggakan, namun perlu dicermati lebih jauh tingkat produktivitas dari angkatan kerja yang bekerja. Jika produktivitas tenaga kerja rendah, maka kecilnya angka pengangguran belum berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di Tabanan juga terindikasi dari adanya *gap* yang cukup besar antara angka kemiskinan dengan angka pengangguran terbuka. Artinya, rendahnya angka pengangguran tidak linear dengan angka kemiskinan. Hal ini bisa terjadi karena penduduk yang bekerja tidak mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menghidupi seluruh anggota keluarganya. Jika dikaitkan dengan pendapatan per kapita penduduk, PDRB per kapita Tabanan masih tergolong rendah, Rp. 46,6 juta per kapita/tahun, lebih rendah dari capaian Provinsi Bali dan nasional yang masing-masing telah mencapai nilai Rp. 50,71 juta dan Rp. 51,89 juta per kapita/tahun. Kondisi ini menunjukkan, bahwa angka pengangguran yang rendah belum bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat Tabanan tergolong baik.

Berkenaan dengan fokus Ketenagakerjaan perlu ditemukan strategi-strategi baru dan berkelanjutan untuk menekan angka pengangguran dari angkatan kerja yang ada di seluruh wilayah. Permasalahan yang kerap dihadapi adalah ketidaktersediaan data SIAPA warga masyarakat yang menganggur dan potensi/bakat APA yang mereka miliki untuk bisamemiliki matapencaharian yang layak. Oleh karenanya, perlu dibangun sebuah proses

dan sistem yang dapat menjadi jembatan antara calon tenaga kerja (warga yang menganggur) dengan kebutuhan ketrampilan untuk bisa masuk dalam pasaran kerja. Aspek peningkatan kompetensi tenaga kerja dan daya saing produksi/industri yang sudah ada di masyarakat juga harus mendapat perhatian serius agar penduduk yang sudah bekerja mendapatkan penghasilan yang layak.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari berbagai pilihan kegiatan, antara lain:

1. Pelatihan Ketrampilan Berbasis kompetensi difokuskan di tiga kecamatan yang memiliki kantong kemiskinan paling tinggi yaitu Kecamatan Baturiti, Kediri dan Pupuan. Jenis pelatihan disesuaikan dengan minat dan kebutuhan masing-masing kecamatan seperti:
 - Teknologi mekanik
 - Jurusan otomotif
 - Jurusan Listrik dan refrigerasi
 - Jurusan Tata Niaga (Komputer)
 - Jurusan tata rias dan jahit
 - Jurusan Pertanian (teknologi dan processing kuliner)
 - Jurusan Spa Terapis
2. Pelatihan keterampilan mobile training unit (MTU)
3. Pelatihan ketrampilan pengembangan usaha masyarakat.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:

1. Memberikan pelatihan satpam pada masyarakat yang menganggur di tiga kecamatan tersebut
2. Memberikan informasi lowongan kerja seluas-luasnya di tiga kecamatan tersebut

3.3 Sektor Budaya

3.3.1. Gambaran Kondisi Dan Capaian Kinerja

Bahwa dalam pelaksanaan program yang telah diwujudkan Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan, telah terwujud pengelolaan adat dan seni serta budaya sesuai dengan kearifan lokal seni dan budaya Tabanan, dengan contoh sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelestarian Subak Bali yang berlokasi di kawasan Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia
2. Pengakuan terhadap seni tari sakaral seperti jauk, topeng dan tektekan sebagai warisan tak benda.

3. Terwujudnya bangunan seni yang fundamental seperti Gedung I Ketut Mario, Patung dan Stage Garuda Wisnu Serasi serta bangunan Museum Sagung Wah sebagai pengakuan terhadap pelaku seni maskot I Ketut Maria.

3.3.2. Kondisi Ideal Yang Diharapkan

Adat dan Budaya merupakan bagian jati diri dan karakter suatu daerah, sesuai dengan perjalanan waktu terjadi penurunan penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa, solidaritas sosial, sikap toleransi dan tenggang rasa dalam masyarakat. Berkaitan dengan adat dan budaya ada beberapa konisi yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatkan minat generasi muda dalam memelihara dan mengembangkan seni budaya lokal
2. Terpolanya program program uapaya pelestarian peninggalan budaya
3. Adanya jaminan kesejahteraan bagi pihak atau masyarakat yang berkiprah dalam pelestarian adat dan seni.

3.4 Sektor Sosial

3.4.1. Gambaran Kondisi Dan Capaian Kinerja

Kemiskinan adalah merupakan suatu keadaan atau ketidakmampuan seseorang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer seperti pangan sandang dan papan termasuk juga kebutuhan dasar tentang pendidikan, kesehatan yang berada dalam suatu wilayah baik desa, kecamatan dan wilayah Kabupaten.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk menanggulangi kemiskinan terus berlanjut dalam periode Pemerintahan yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Tabanan yaitu Tabanan Serasi mewujudkan Masyarakat Tabanan sejahtera aman dan berprestasi berlanjut kepada periode Pemerintahan yang akan datang.

Terkait dengan misi I RPJMD Kabupaten Tabanan periode 2016-2021 yaitu membentuk sumber daya Manusia yang berkualitas, berbudaya dan berkeadilan sosial, dimana tingkat kemiskinan dan solusi pemecahannya berada di masingmasing wilayah Kecamatan di Kabupetan Tabanan. Mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT), masih banyak terdapat potensi kemiskinan masyarakat Kabupaten Tabanan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan di 10 kecamatan dan 133 Desa.

Adapun keragaan jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Tabanan dapat dijabarkan berdasarkan wilayah kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Jumlah Rumah Tangga Miskin

| No. | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK (jiwa) | JUMLAH KK | JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN (RTS) |
|-----|-----------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1. | KEDIRI | 82.953 | 24.236 | 4.468 |
| 2. | TABANAN | 71.644 | 22.226 | 2.803 |
| 3. | BATURITI | 51.482 | 14.832 | 4.536 |
| 4. | PENEBEL | 51.608 | 17.851 | 2.471 |
| 5. | MARGA | 42.759 | 13.356 | 2.344 |
| 6. | PUPUAN | 43.205 | 12.429 | 5.115 |
| 7. | KERAMBITAN | 40.990 | 13.370 | 2.334 |
| 8. | SELEMADEG TIMUR | 24.013 | 7.783 | 2.298 |
| 9. | SELEMADEG | 22.108 | 6.959 | 2.893 |
| 10. | SELEMADEG BARAT | 21.824 | 7.157 | 2.131 |
| | JUMLAH | 452.586 | 140.199 | 31.393 |

Dari table diatas dapat dilihat bahwa kemiskinan tertinggi di 10 kecamatan yang berada di Kabupaten Tabanan adalah di Kecamatan Pupuan dengan jumlah RTS 5.115, di Kecamatan Baturiti dengan jumlah 4.536, Kecamatan Kediri sejumlah 4.468, Kecamatan Selemadeg sejumlah 2.893 dan Kecamatan Tabanan dengan jumlah 2.803 RTS.

3.4.2 Kondisi Ideal Yang Diharapkan

Salah satu syarat keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah dengan cara mengidentifikasi kelompok sasaran dan wilayah sasaran dengan tepat. Program pengentasan dan pemulihan nasib orang miskin tergantung dari langkah awal yaitu ketetapan mengidentifikasi siapa yang dikatakan miskin dan di mana dia berada. Aspek di mana “si miskin” dapat ditelusuri melalui si miskin itu sendiri serta melalui pendekatan-pendekatan profil wilayah atau karakter geografis dengan melakukan sebagai berikut:

A. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia(SDM)

- Kegiatan Pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat miskin
- Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- Magang dalam daerah maupun luar daerah

B. Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi lokal -Bantuan sosial terhadap kelompok sosial masyarakat -Bantuan Tenda, kursi, kompor masak, dan alat alat masak.

C. Program Bedah rumah

D. Program Rehab Rumah

E. Program Kartu Indonesia Sehat (KIS)

3.4.3 Program Program / Hal Hal Dikerjakan Setiap Wilayah

Percepatan peanggulangan kemiskinan, terdiri dari 4 Desil (kelompok persepuluhsehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil), yaitu:

1. Desil 1: pendapatan masyarakat miskin 0-10% terendah dan bantuan yang harus diberikan adalah KIS, beasiswa miskin, bedah rumah, PKH dan BPNT.
2. Desil 2: pendapatan masyarakat miskin 11-20% terendah dan bantuan yang harus diberikan adalah KUBE,
3. Desil 3: Pendapatan masyarakat miskin 21-30% terendah dan bantuan yang harus diberikan adalah KUR, KTA, JAMKRIDA
4. Desil 4: Pendapatan masyarakat miskin 31-40% terendah dan bantuan yang harus diberikan adalah saniatsi, pelatihan-pelatihan dan bursa kerja.

Dari keempat desil, 40% pendapatan masyarakat miskin terendah dan angka kemiskinan berdasarkan data BDT tahun 2019, jadi Program prioritas penanganan kemiskinan difokuskan di kecamatan Pupuan, kecamatan Baturiti, Kecamatan Kediri, Kecamatan Selemadeg dan Kecamatan Tabanan.

3.5 Sektor Kesehatan

Kesehatan merupakan syarat utama membentuk sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing. Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya angka harapan hidup (AHH). Guna mewujudkan hal itu, pemerintah daerah berkewajiban memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan yang terdiri dari 12 jenis pelayanan kesehatan: 1) pelayanan kesehatan ibu hamil; 2) pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4) pelayanan kesehatan balita; 5) pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar; 6) pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7) pelayanan kesehatan pada hingga lanjut; 8) pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi; 9) pelayanan kesehatan pada penderita diabetes militus; 10) pelayanan kesehatan pada penderita gangguan jiwa berat; 11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis, serta 12) pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV/AIDS. Pencapaian pelaksanaan SPM Kesehatan tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan SDM Kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, serta kesadaran dan prilaku hidup sehat masyarakat.

3.5.1 Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan secara prima kepada masyarakat sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) baik jumlah maupun kompetensinya. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2016 tentang Puskesmas, setiap Puskesmas minimal mesti memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan. Namun, sampai saat ini tidak semua Puskesmas di Kabupaten Tabanan memiliki ke sembilan jenis tenaga kesehatan tersebut. Secara umum SDM Kesehatan yang masih kurang antara lain: tenaga administrasi kesehatan, apoteker/asisten apoteker, bendahara/bendahara pembantu, bidan ahli, perawat ahli, perawat gigi, dokter, dokter gigi, entomologi dan epidemiologi kesehatan, perekam medis, pranata laboratorium kesehatan, sanitarian dan teknisi elektromedis. Sebaliknya, beberapa SDM Kesehatan sudah melebihi kebutuhan seperti: bidan dan perawat dengan sebaran yang tidak merata antar-puskesmas.

Tabel 3.5 Ketersediaan dan Kebutuhan SDM Kesehatan per-Kecamatan Tahun 2019

| NO | Kecamatan | Puskesmas | SDMK Saat Ini | Kebutuhan (ABK) | Kurang/ lebih |
|----|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1 | Tabanan | Tabanan I | 53 | 58 | -5 |
| | | Tabanan II | 47 | 44 | 3 |
| | | Tabanan III | 87 | 65 | 22 |
| 2 | Kerambitan | Kerambitan I | 37 | 70 | -33 |
| | | Kerambitan II | 36 | 59 | -23 |
| 3 | Selemadeg | Selemadeg | 85 | 103 | -18 |
| 4 | Selemadeg Barat | Selemadeg Barat | 72 | 71 | 1 |
| 5 | Selemadeg Timur | Seltim I | 30 | 57 | -27 |
| | | Seltim II | 43 | 73 | -30 |
| 6 | Pupuan | Pupuan I | 71 | 75 | -4 |
| | | Pupuan II | 39 | 69 | -30 |
| 7 | Penebel | Penebel I | 69 | 82 | -13 |
| | | Penebel II | 32 | 65 | -33 |
| 8 | Baturiti | Baturiti I | 63 | 95 | -32 |
| | | Baturiti II | 35 | 67 | -32 |
| 9 | Marga | Marga I | 41 | 61 | -20 |
| | | Marga II | 47 | 59 | -12 |
| 10 | Kediri | Kediri I | 49 | 68 | -19 |
| | | Kediri II | 38 | 50 | -12 |
| | | Kediri III | 45 | 52 | -7 |

Dari 20 jumlah puskesmas se-Kabupaten Tabanan hampir semua puskesmas memiliki kekurangan setidaknya pada salah satu jenis SDM Kesehatan. Namun, pada beberapa Puskesmas jenis SDM Kesehatan tertentu melebihi standar, seperti: di Puskesmas Tabanan III, Tabanan II dan Selemadeg Barat sudah kelebihan tenaga bidan dan perawat, serta Puskesmas Tabanan I kelebihan tenaga Bidan (Tabel 3.5).

3.5.2 Sarana Dan Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana kesehatan seperti gedung, genset, IPAL, *ambulance* dan yang lainnya sangat mutlak diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat. Kondisi saat ini ketersediaan sarana yang kurang terdapat pada Puskesmas yang dibangun tahun 2019, yaitu: tiga Puskesmas non rawat inap (Puskesmas Pupuan II, Kediri III dan Seltim II) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang baru yaitu: Pustu Timpag, Nyambu, dan Tua. Disamping itu, Puskesmas yang dipersiapkan untuk alih status menjadi Puskesmas Rawat Inap, seperti Kerambitan II, alat kesehatan dan meubelernya masih kurang.

Terdapat sejumlah bangunan Pustu yang rusak, pada wilayah kerja Puskesmas sebagai berikut:

- 1) Puskesmas Selemadeg Barat: Pustu Lumbung dan Lumbung Kauh,
- 2) Puskesmas Pupuan II: Pustu Padangan dan Sanda.
- 3) Puskesmas Pupuan I: Pustu Pajahan;
- 4) Puskesmas Selemadeg: Pustu Pupuan Sawah.
- 5) Puskesmas Kerambitan II: Pustu Blumbang,
- 6) Puskesmas Tabanan I: Pustu Bongan,
- 7) Puskesmas Tabanan II: Pustu Buahon.
- 8) Puskesmas Penebel II: Pustu Wongaya Gede,
- 9) Puskesmas Marga I: Pustu Payangan dan Peken,
- 10) Puskesmas Marga II: Pustu Tegaljadi.
- 11) Puskesmas Baturiti 1: Pustu Apuan dan Antapan,
- 12) Puskesmas Baturiti II: Pustu Perean Kauh.
- 13) Puskesmas Kediri I: Pustu Pejaten dan Abiantuwung,
- 14) Puskesmas Kediri III: Pustu Pandak, Pangkung Tibah dan Pustu Belalang.

3.5.3 Desa *Open Defection Free (ODF)*

Salah satu indikator yang dapat dijadikan potret kesadaran perilaku hidup bersih dan hidup sehat masyarakat adalah perilaku tidak buang air besar sembarangan atau *open defecation free (ODF)*. ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Desa ODF adalah desa yang 100 persen individunya sudah tidak buang air besar sembarangan.

Saat ini dari 133 desa yang ada di Kabupaten Tabanan baru terdapat 18 desa ODF, sedangkan selebihnya sebanyak 115 (86,65%) belum terbebas dari buang air besar sembarangan.. Hal ini patut menjadi perhatian serius dari para pemangku kepentingan mengingat Bali pada umumnya dan Tabanan pada

khususnya terkenal sebagai daerah tujuan wisata. Berdasarkan kecamatannya maka Kecamatan Baturiti, Selemadeg Barat dan Tabanan merupakan kecamatan yang perlu menjadi fokus perhatian ODF karena satupun desanya belum ada yang ODF.

3.6 Sektor Pertanian

3.6.1 Gambaran Kondisi Capaian Kinerja Bidang Pertanian

Dalam sektor ini ada 2 komunitas yang diandalkan yaitu dari lahan basah dan perkebunan. Dari kedua sektor tersebut lebih banyak dari sektor perkebunan. Petani masih menjual produk pertanian dalam bentuk bahan baku, dan sedikit yang mengusahakan dalam bentuk pengolahan bahan baku, sehingga *edit valuenya* masih rendah. Sektor Pertanian sampai saat ini masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tabanan, namun peranannya terus berkurang, kondisi ini dapat menjadi indikasi terjadinya pergeseran struktur ekonomi di Tabanan. Tahun 2017 kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB sebesar 22,55% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kondisi terjadi hampir seluruh sektor pertanian yaitu subsektor tanaman bahan makanan, peternakan, kehutanan dan perikanan peranannya mengecil dibandingkan tahun 2016. Meski demikian, secara umum sektor pertanian masih menjadi tumpuan bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

Saat ini daya saing sektor pertanian Kabupaten Tabanan utamanya didukung oleh kuantitas produk pertanian yang cukup besar sehingga mampu menjaga kontinuitas pasokan bagi kebutuhan perdagangan maupun industri pariwisata Bali.

3.6.2 Gambaran Kondisi Ideal Yang Disarankan

Daya saing sumber daya manusia dibidang pertanian dan produk olahan hasil pertanian masih harus terus dibenahi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dibidang pertanian tidak hanya dalam hal cara mengelola produk pertanian, tetapi secara kualitas hidup juga perlu ditingkatkan sehingga nantinya mampu melakukan inovasi-inovasi lain yang terkait dengan sektor pertanian. Disisi lain upaya untuk meningkatkan target untuk memenuhi capaian kinerja di bidang pertanian sesuai dengan rpjm belum sepenuhnya dapat dikerjakan. Upaya – upaya inovasi juga sudah banyak dilakukakan anatar lain: gerbang pangan serasi, dan pagu indikatif kecamatan untuk menangani sektor pertanian sudah dilakukan, namun hal ini belum sepenuhnya dapat tercapai. Hal ini disebabkan karena aspek kelembagaan yang

menjembatani antara sektor hulu (petani), kontinuitas, kualitas dan kuantitas (P3K) hasil produksi tidak dapat dipenuhi dan sektor hilir (Pasar) tidak ada lembaga yang mengurus secara tegas.

Ada lembaga yang mengurus secara tegas untuk menjembatani antara sektor hulu dan sektor hilir.

Misalnya: produk olahan pertanian mulai jenis, kualitas, dan pemasarannya yang masih perlu dilakukan pembenahan sehingga mampu meningkatkan nilai tukar produk bagi petani di Kabupaten Tabanan.

3.6.3 Hal-Hal Yang Perlu Dikerjakan Di Setiap Wilayah

Untuk meningkatkan kinerja di sektor Pertanian yang ada di Kabupaten Tabanan ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu :

- Sarana produksi pertanian dan mesin-mesin pertanian perlu ditingkatkan guna menjaga daya saing
- Usaha-usaha inovatif untuk menggarap mulai dari sektor hulu, tengah dan sektor hilir sehingga pertanian tetap menjadi sektor unggulan di Kabupaten Tabanan.
- Menjaga ketersediaan pangan tambahan seperti sayur mayur, buah tomat, cabe dan pangan yang lainnya diupayakan dengan mengoptimalkan pemberdayaan pekarangan pangan yang dikerjakan langsung masyarakat.

3.7 Sektor Pariwisata

3.7.1 Gambaran Umum Capaian Kinerja Sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Tabanan. Menjadi salah satu sektor prioritas pembangunan daerah selain sektor pertanian yang menjadi sektor basis Kabupaten Tabanan. Sejalan dengan visi pembangunan daerah Kabupaten Tabanan yaitu “Tabanan Serasi”, pembangunan sektor pariwisata dilaksanakan melalui salah satu misi “Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pertanian dan Pariwisata”. Dengan Strategi Program pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2021 Kabupaten Tabanan. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan pariwisata dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.

Program pembangunan dilaksanakan melalui Dinas Pariwisata yang dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan. Ukuran capaian kinerja pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Tabanan, dapat dilihat melalui laporan kinerja Dinas Kabupaten Tabanan

Tahun 2018. Dalam laporan kinerja ini menjabarkan hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, berdasarkan capaian sektor pariwisata dan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Dinas Pariwisata, yang merupakan cerminan amanat visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Sektor Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2018

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian 2017 | Capaian 2018 | | | |
|----|------------------------------|--|--------------|--------------|--------|-----------|------------|
| | | | | Satuan | Target | Realisasi | Persentase |
| 1 | Membangun Ekonomi Kerakyatan | 1 Jumlah desa yang mendapatkan PAD desa dari sektor pariwisata | 4 DTW | Jumlah DTW | 5 | 4 | 80 % |
| | | 2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten | 26,51 % | Persentase | 23,84 | 24,71 | 104% |

Berdasarkan capain kinerja sektor pariwisata tahun 2018 sebagaimana table 3.6 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja belum mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dari 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan, baru satu indikator kinerja yang dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu:

1. Indikator kinerja kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten dengan realisasi 24,71% dari target 23,84 % atau sebesar 104 %. Capaian ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya 2017 yaitu sebesar 26,51 %, menunjukkan adanya penurunan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten.
2. Indikator jumlah desa indikator jumlah desa yang mendapat PAD desa dari sektor pariwisata baru mencapai belum mencapai target sesuai dengan yang ditentukan dari target 5 DTW terealisasi baru 4 DWT.

3.7.2 Gambaran Kondisi Ideal Yang Disarankan

Berdasarkan data di atas, menunjukkan pencapaian kinerja sektor pariwisata masih belum optimal untuk mencapai target sasaran strategi yang

ditetapkan. Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tabanan dalam upaya pencapaian kinerja sektor pariwisata dipengaruhi oleh beberapa faktor permasalahan. Dari 17 Daya Tarik Wisata (DTW) yang ditetapkan sebagai rencana pengembang pariwisata Kabupaten Tabanan belum mampu berkebang secara optimal. Tercatat hingga saat ini baru 4 DTW yang mampu memberikan kontribusi terhadap PAD desa yaitu DTW Tanah Lot, DTW Ulun Danu, DTW Jatiluwih dan DTW Alas Kedaton.

Belum terkelolanya sejumlah potensi daya tarik wisata, rendahnya fasilitas, akses, sarana dan prasarana pariwisata, serta konsistensi pengembangan daya tarik wisata yang ada menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Tabanan. Pengembangan pariwisata masih tersektor pada sejumlah DTW yang telah berkembang, sehingga pemerataan pembangunan pariwisata belum dapat diwujudkan. Selain itu upaya pembangunan sektor pariwisata melalui pengembangan desa wisata, yang saat ini telah mencapai 24 desa wisata di Kabupaten Tabanan belum mampu berkembang secara optimal untuk mendukung pencapaian kinerja sektor pariwisata.

Berdasarkan atas permasalahan tersebut, gambaran kondisi ideal yang diharapkan adalah terwujudnya pemerataan pembangunan sektor pariwisata, meningkatnya daya saing dan berkembangnya daya tarik wisata di Kabupaten Tabanan, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja pembangunan daerah khususnya sektor pariwisata di Kabupaten Tabanan.

3.7.3 Hal-Hal Yang Perlu Dikerjakan Di Setiap Wilayah.

Untuk mewujudkan pencapaian kinerja sektor pariwisata adapun hal-hal yang perlu dilakukan adalah melaksanakan program pembangunan berdasarkan atas pencapaian kinerja yang telah tercapai dan belum maksimal dapat dicapai. Mewujudkan pemerataan pembangunan sektor pariwisata di wilayah barat pada khususnya, melihat pembangunan daya tarik wisata di wilayah utara dan selatan Kabupaten Tabanan sudah cukup berkembang. Serta optimalisasi pengembangan daya saing desa wisata dalam upaya peningkatan dan pengembangan diversifikasi daya tarik wisata Kabupaten Tabanan.

3.8 Sektor Ekonomi Kerakyatan

3.8.1 Perindustrian Dan Perdagangan

3.8.1.1 Gambaran Kondisi Capaian Kinerja Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Kontribusi sektor sekunder berupa industri pengolahan di Kabupaten Tabanan tergolong rendah. Sektor ini menyumbang kontribusi dari lapangan usaha ini sebesar 5,73%. Cakupan kelompok Industri Kecil Menengah dalam bidang ini, terdiri dari pengerajin Kayu, industri pengolahan besi/ tempat lilin, serta industri keramik/ gerabah, Alat Bangunan, Air isi ulang, makanan jadi, pakaian dan lain lain. Masih banyak peluang dapat dikembangkan industri di Bidang Pertanian dan Pariwisata. Untuk itu perlu digali jenis – jenis usaha dan industri yang mendukung pengembangan pertanian dan pariwisata, seperti industri pabrik pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung pariwisata. Di Kabupaten Tabanan sampai dengan Tahun 2019 terdapat 835 Industri Kecil dan Menengah yang tersebar di 10 Kecamatan seperti Tabel Berikut:

Tabel 3.7 Jumlah IKM di Kabupaten Tabanan

| NO | KECAMATAN | JUMLAH IKM | JENIS USAHA |
|----|-----------------|------------|--|
| 1 | Tabanan | 198 | Air isi Ulang, Baja Ringan, Alat Bangunan, Kerajinan Besi, Meubel, Pakaian, Trali, Makanan Jadi, Fotografi, Tahu/Tempe, Tempat Sembahyang, Tas |
| 2 | Kediri | 219 | Air Minum, Anyaman Bambu, Alat Alat Bangunan, Pakaian Jadi, Meubel, Makanan Jadi, Patung, Kerajinan Besi |
| 3 | Marga | 60 | Alat Bangunan, Air Minum, Tempat Sembahyang, Trali, Makanan Jadi. |
| 4 | Baturiti | 44 | Air Minum Kemasan, Alat Bangunan, Furniture, Trali, Tempat Sembahyang, Makanan Jadi |
| 5 | Kerambitan | 73 | Alat Bangunan, Meubel, Air Minum Isi Ulang, Konfeksi, Makanan Jadi, Pupuk Organik, Tempat Sembahyang, Trali |
| 6 | Penebel | 81 | Alat Bangunan, Air Minum, Kerajinan Besi, Pupuk Organik, Alat Sembahyang, Tahu/Tempe, Furniture |
| 7 | Selemadeg Timur | 54 | Alat Bangunan, Makanan Jadi, Meubel, Tempat Sembahyang, Trali, Lukisan |
| 8 | Selemadeg | 42 | Air Minum, Alat Bangunan, Patung, Tempat Sembahyang, Pupuk Organik, Makanan Jadi, Tempat Lilin. |
| 9 | Selemadeg Barat | 24 | Alat Bangunan, Furniture, Tempat Sembahyang, Jus Manggis, Kopi Luwak, Kopi Bubuk |
| 10 | Pupuan | 40 | Alat Bangunan, Kopi Bubuk, VCO, Furniture, Minyak Kelapa |
| | JUMLAH | 835 | |

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa kelompok industry kecil menengah yang terbesar berada di Kecamatan Kediri sebesar 219 IKM dengan berbagai jenis usaha dan kelompok industry kecil paling keci ada di Kecamatan Sekemadeg Barat sebesar 24 IKM.

3.8.1.2 Gambaran Kondisi Ideal Yang Disarankan

Adapun gambaran kondisi ideal yang diharapkan dalam upaya pembangunan sektor Perindustrian adalah meningkatkan kapasitas Iptek

system produksi, pengendalian mutu produksi serta memfasilitasi pemasaran produk petani dan UMKM. Adapun target kapasitas Iptek system produksi yang ditetapkan adalah sebesar 100 IKM pada tahun 2015 dan sebesar 175 IKM di Tahun 2021, sedangkan untuk sektor Perdagangan adalah Pengamanan Perdagangan, pelayanan perlindungan konsumen dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan. Adapun target Pengamanan Perdagangan yang ditetapkan adalah sebesar 45% pada tahun 2018 dan sebesar 60% di Tahun 2021.

3.8.1.3 Hal-hal Yang Perlu Dikerjakan Di Setiap Wilayah

Untuk meningkatkan kinerja sektor Perindustrian dan Perdagangan yang ada di Kabupaten Tabanan ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu: meningkatkan Kapasitas Iptek system produksi, pengendalian mutu produksi serta memfasilitasi pemasaran produk petani dan UMKM, Pelayanan dan Perlindungan Konsumen serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan terutama untuk daerah Tabanan Barat yang termasuk ke dalam Kawasan *Nikosake*.

3.8.2 Koperasi

3.8.2.1 Gambaran Kondisi Capaian Kinerja Bidang Koperasi dan UKM

Koperasi merupakan wadah ekonomi kerakyatan, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tabanan berkomitmen untuk mendorong koperasi menjadi lembaga penggerak ekonomi perdesaan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Saat ini koperasi di Tabanan berjumlah 569 koperasi, terdiri dari 440 (77,28) koperasi aktif dan 129 koperasi tidak aktif. Dari jumlah tersebut 6,8 persen merupakan koperasi yang bergerak dari sektor riil, sedangkan sisanya masih bergerak di bidang koperasi simpan pinjam. Kedepannya jumlah koperasi yang bergerak sector riil khususnya pertanian akan terus didorong penambahannya, sehingga akan mampu memberikan nilai tambah bagi petani.

3.8.2.2 Gambaran Kondisi Ideal Yang Disarankan

Adapun gambaran kondisi idial yang diharapkan dalam upaya pembangunan sektor kopersi adalah tercapainya pembangunan sesuai target yaitu berkembangnya koperasi sektor riil yang awalnya ditetapkan adalah sebesar 0,55% pada tahun 2015 dapat tercapai sebesar 1,46% di Tahun 2021.

3.8.2.3 Hal-Hal Yang Perlu Dikerjakan Di Setiap Wilayah

Untuk meningkatkan kinerja sektor koperasi dan UKM hal-hal yang perlu dikerjakan adalah dengan meningkatkan Kualitas Koperasi sector riil, karena selama ini Koperasi dan kelembagaan Ekonomi Kerakyatan lainnya belum mampu berperan sebagai pelaku distribusi hasil Pertanian, Perikanan dan kerajinan rakyat lainnya, melalui upaya-upaya : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasii, Fasilitasi Pemasaran Produksi Petani dan UMKM, Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM serta pembangunan sarana dan prasarana lainnya.

3.9 Sektor Masyarakat Desa

3.9.1 Gambaran Kondisi Capaian Kinerja

Berdasarkan isi sasaran target pencapaian indikator RPJMD Kabupaten Tabanan 2016-2021 bahwa penetapan kebijakan dan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa berfungsi menguatkan lembaga pemerintahan dan kelompok masyarakat berkenaan sesuai dengan perkembangan ekonomi perdesaan.

Dalam upaya mengembangkan kemandirian ekonomi, Pemerintah Kabupaten Tabanan juga telah memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan memanfaatkan potensi desa sebagai core business. Tahun 2015 telah berdiri 50 BUMDes (BKK) yang sumber dananya dari APBD Kabupaten di 10 kecamatan dengan *core business* pengolahan hasil pertanian. Pengolahan hasil pertanian yang menjadi pilihan usaha kelima puluh BUMDes tersebut antara lain: Pengolahan kopi, kelapa, ikan, abon, kripik/krupuk, dan produk unggulan lainnya. Disisi lain, dapat meningkatkan dan menggerakkan daya saing sektor ekonomi kerakyaktan melalui pemberdayaan masyarakat desa berbasis pertanian dan pariwisata. Fungsi BUMDes yaitu menangani seluruh produk unggulan desa dan menyerap hasil pengolahan produk pertanian yang di hasilkan oleh kelompok-kelompok Berdasarkan klasifikasi tingkat perkembangan desa dapat di bagi menjadi tiga jenis klasifikasi desa yaitu desa swadaya, desa swakarsa,dan desa swasembada dari 133 desa yang ada di wilayah Kabupaten Tabanan hanya ada desa swakarsa sejumlah 84 desa, dan 49 desa swasembada. Berikut data BUMDes yang tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Tabanan.

Tabel 3.8 Jumlah BUMDES di Kabupaten tabanan

| Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah BUMDes Eksisting | Jumlah Bumdes yang Kurang |
|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| Penebel | 18 | 9 | 9 |
| Baturiti | 12 | 7 | 5 |
| Marga | 16 | 4 | 12 |
| Tabanan | 12 | 8 | 4 |
| Kediri | 15 | 5 | 10 |
| Kerambitan | 15 | 4 | 11 |
| Selemadeg Timur | 10 | 4 | 6 |
| Selemadeg | 10 | 4 | 6 |
| Selemadeg Barat | 11 | 6 | 5 |
| Pupuan | 14 | 11 | 3 |
| Total | 133 | 62 | 71 |

3.9.2 Gambaran Kondisi Ideal Yang Disarankan

Sesuai dengan amanat undang-undang tahun 2014 tentang desa yang dijabarkan ke dalam PP 43/2014 Jo. PP 47/2015 tentang peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 DAN PP 60/2015 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN. Klasifikasi pembangunan desa berdasarkan:

- 1) Aspek: Tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan.
- 2) Cakupan: A. Pemenuhan kebutuhan dasar. B. Pembangunan sarana dan prasarana desa. C. Pengembangan potensi ekonomi lokal, D. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 3) Prioritas, Program, Kegiatan, dan Kebutuhan: A. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. B. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis sumber daya lokal yang tersedia. C. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif. D. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi. E. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.
- 4) Pelaksana: Pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Berdasarkan Klasifikasi pembangunan desa, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ada beberapa bidang dan program yang perlu dilaksanakan, yaitu:
 - a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa diwujudkan sesuai peraturan dan petunjuk, baik secara administrasi maupun terhadap pemenuhan sarana dan prasarana desa.

- b. Bidang Pembangunan Desa; Kegiatan fisik untuk membantu percepatan sarana prasarana pembangunan Masyarakat Desa seperti: perbaikan saluran irigasi, jalan desa, gorong-gorong, jaringan air bersih, TPA, jalan pemukiman, jalan usaha tani dll.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dapat diwujudkan dalam program-program seni dan budaya, sarana olahraga, kerukunan umat, lembaga kemasyarakatan dan Trantibmas.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat/Peningkatan Kapasitas SDM
 - Pelatihan pada kelompok-kelompok masyarakat
 - Pelatihan Perbekel beserta perangkat masyarakat
 - Pelatihan TTP
 - Kelompok ekonomi produktif, kelompok masyarakat miskin, kelompok pemuda, nelayan dan perempuan.
- e. Bidang tak terduga
 - Bencana alam dll

3.9.3 Hal-Hal Yang Perlu Dikerjakan Di Setiap Wilayah

- a. Prioritas Pertama (Tahun 2020-Tahun 2022) untuk Pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes adalah di 5 Kecamatan (Kec. Pupuan, Selemadeg, Selemadeg Barat, Selemadeg Timur, Kerambitan) di bagian barat Kabupaten Tabanan karena termasuk daerah miskin dan KPPN sejumlah 31 BUMDes.
- b. Prioritas Kedua (Tahun 2023) untuk Pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes adalah di 3 Kecamatan (Kec. Marga, Baturiti, dan Penebel).
- c. Prioritas Ketiga (Tahun 2024) untuk Pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes adalah di 2 Kecamatan (Kec. Tabanan dan Kediri).

3.10 Sektor Infrastruktur

Keberhasilan inklusifitas Kabupaten Tabanan tidak mungkin dicapai apabila tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Untuk itu strategi pembangunan infrastruktur di Tabanan dilakukan melalui: (1) pembangunan infrastruktur fisik ke PU an, energi dan transportasi (*hardinfrastructure*) dalam rangka peningkatan konektifitas untuk mendukung sentra produksi agropolitan, dalam rangka meningkatkan kelayakan hidup manusia. Sedangkan dalam rangka pembangunan berkelanjutan perlu didukung dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik. Jika ketiga komponen tersebut dapat berjalan dengan sinergi dan terpadu, maka akan tercipta

pemerataan kesejahteraan, pengurangan ketimpangan, peningkatan konektivitas, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung semua program pembangunan di Kabupaten Tabanan, maka diperlukan dukungan semua stakeholder mulai dari Eksekutif dan Legislatif. Dalam rangka menangkap semua program pembangunan disamping dari kajian teknokratik, juga ada unsur politik, yang biasa dilakukan oleh pihak anggota DPRD melalui Reses. Reses ini merupakan suatu proses perencanaan yang dilakukan anggota DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat terhadap isu-isu dan permasalahan yang ada. Untuk menghindari terjadi salah sasaran dan tujuan yang ingin dicapai diperlukan gambaran kondisi dan potensi serta permasalahannya wilayah masing-masing.

Dengan mengacu kepada Dokumen Perencanaan RPJP dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan visi Tabanan Serasi, serta untuk mencapai dan mewujudkan misi 4 yaitu Mempercepat Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur, sehingga diperlukan suatu system perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang melekat. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan pengelolaan data yang akurat, yang kemudian diterjemahkan kedalam Reses.

3.10.1 Jalan

Infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Tabanan, yaitu Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan non status (jalan desa). Untuk Jalan Provinsi di Kabupaten Tabanan ada sepanjang 135,79 km dalam kondisi baik sekitar 75%, kondisi sedang 9,52%, dan rusak sampai rusak berat sekitar 15,22%. Secara umum panjang jalan Kabupaten Tabanan 863,218 km, dimana kondisi jalan baik sampai sedang sebesar 78,41%, namun masih menyisakan pekerjaan rumah sebesar 21,59 % jalan rusak. Sebagian besar kondisi jalan rusak terdapat di wilayah Tabanan bagian barat. Wilayah barat memiliki ruas terpanjang sebesar 341,288 km atau 39,54% dari total panjang jalan di Kabupaten. Berikut Kondisi Jalan Kabupaten Tabanan Tahun 2014 - 2018.



Gambar 3.3 Kondisi Jalan Kabupaten Tabanan 2014-2018

Hingga tahun 2018 wilayah barat meliputi Kecamatan Pupuan, Selemadeg Barat, Selemadeg dan Selemadeg Timur, ruas jalan yang membutuhkan penanganan sepanjang 97,76 km atau 11,33 %. Sementara wilayah selatan meliputi Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kecamatan Kediri sekitar 5,22% dan Wilayah Utara meliputi Kecamatan Penebel, Kecamatan Baturiti ruas jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat pada kisaran 5,05 %, sehingga pada tahun 2019 diharapkan mampu dituntaskan dan tahun 2020 penanganan jalan difokuskan pada wilayah barat. Persentase kondisi ruas jalan Kabupaten Tabanan berdasarkan wilayah Tahun 2018.



Gambar 3.4 Persentase kondisi ruas jalan Kabupaten Tabanan Berdasarkan wilayah Tahun 2018.

Tabel 3.9 Kondisi Jalan Kabupaten Tabanan Tahun 2018

| No. | KECAMATAN | PANJANG RUAS (Km) | PANJANG TIAP KONDISI | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------|--------|------|--------------|-------|-------------|-------|
| | | | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | |
| | | | KM | % | KM | % | KM | % | KM | % |
| 1 | Tabanan | 91,65 | 81,56 | 88,99 | 3,47 | 3,79 | 1,18 | 1,28 | 5,45 | 5,95 |
| 2 | Kediri | 114,99 | 91,29 | 79,39 | 1,63 | 1,42 | 7,03 | 6,11 | 15,05 | 13,09 |
| 3 | Kerambitan | 62,53 | 44,06 | 70,46 | 2,10 | 3,36 | 11,27 | 18,02 | 5,10 | 8,16 |
| 4 | Marga | 65,40 | 46,80 | 71,56 | - | - | 8,00 | 12,23 | 10,60 | 16,21 |
| 5 | Penebel | 122,53 | 99,18 | 80,94 | 1,40 | 1,14 | 3,20 | 2,61 | 18,75 | 15,30 |
| 6 | Baturiti | 64,83 | 61,53 | 94,91 | 0,30 | 0,46 | - | - | 3,00 | 4,63 |
| 7 | Selemadeg Timur | 105,96 | 63,00 | 59,46 | 1,60 | 1,51 | 4,20 | 3,96 | 37,16 | 35,07 |
| 8 | Selemadeg | 51,98 | 40,85 | 78,59 | 1,73 | 3,32 | 3,70 | 7,12 | 5,70 | 10,97 |
| 9 | Selemadeg Barat | 105,90 | 76,20 | 71,95 | - | - | 6,50 | 6,14 | 23,20 | 21,91 |
| 10 | Pupuan | 77,45 | 58,65 | 75,73 | 1,50 | 1,94 | 5,10 | 6,58 | 12,20 | 15,75 |
| A. Total Panjang Jalan (Km) | | 863,22 | 663,11 | | 13,73 | | 50,18 | | 136,21 | |
| B. Persentase Jalan (%) | | 21,59 | | 76,82 | | 1,59 | | 5,81 | | 15,78 |

Kondisi jalan Kabupaten Tabanan terus mengalami peningkatan, capaian ini tidak terlepas dari program peningkatan jalan kabupaten melalui perkerasan dengan sistem *hotmix*, sehingga target kondisi jalan mantap 2020 dapat tercapai tentunya didukung oleh sumber pendanaan yang cukup, dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi pada berbagai sektor di daerah dan antar wilayah.

Demikian juga halnya dengan Jalan non status (jalan des/lingkungan), dari panjang Total 1.685,293 km, hamper sudah 94,32% dalam kondisi baik sampai sedang yaitu 1015,80 km (60,28%) dalam kondisi baik, 564,85 km

(33,52%) kondisi sedang, sedangkan 101,20 km (6,20%) dalam kondisi rusak berat.

Dengan demikian untuk infrastruktur Jalan non status semua kecamatan masih perlu di tingkatkan biak pendanaan melalui Dana Desa, APBD Kabupaten, maupun melalui kementrian/lembaga pusat terkait Adapaun Jalan Desa yang paling banyak dalam kondisi rusak yaitu di Kecamatan Pupuan, Penebel, Kediri, Kerambitan dan di Kecamatan Selemadeg Timur.

Tabel 3.10 Kondisi Jalan Non Status di Kabupaten Tabanan Tahun 2018

| NO | KECAMATAN | PANJANG (Km) | KONDISI JALAN LINGKUNGAN | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | B | % | S | % | R | % |
| 1 | Kediri | 155,52 | 88,52 | 56,92 | 48,079 | 30,91 | 15,48 | 9,95 |
| 2 | Marga | 94,52 | 50,97 | 53,92 | 38,569 | 40,81 | 4,98 | 5,27 |
| 3 | Kerambitan | 100,07 | 63,06 | 63,02 | 26,562 | 26,54 | 10,44 | 10,43 |
| 4 | Penebel | 282,95 | 157,56 | 55,68 | 107,05 | 37,83 | 18,34 | 6,48 |
| 5 | Tabanan | 94,05 | 47,31 | 50,30 | 43,272 | 46,01 | 3,47 | 3,69 |
| 6 | Baturiti | 162,77 | 113,78 | 69,90 | 45,32 | 27,84 | 3,67 | 2,25 |
| 7 | Pupuan | 221,433 | 133,02 | 60,07 | 67,809 | 30,62 | 20,60 | 9,30 |
| 8 | Selemadeg Timur | 172,3 | 98,04 | 56,90 | 62,101 | 36,04 | 12,16 | 7,06 |
| 9 | Selemadeg Barat | 243,18 | 163,98 | 67,43 | 74,709 | 30,72 | 4,50 | 1,85 |
| 10 | Selemadeg | 158,5 | 99,59 | 62,83 | 51,38 | 32,42 | 7,53 | 4,75 |
| JUMLAH | | 1685,29 | 1015,8 | 60,28 | 564,85 | 33,52 | 101,2 | 6,20 |

3.10.2 Irigasi

Sebagai daerah pertanian sebagai lumbung pangannya Bali, Tabanan memiliki potensi sumber daya air cukup melimpah. Kebutuhan untuk irigasi sawah di Tabanan mencapai 342,83 juta m³/tahun, namun belum didukung dengan jaringan irigasi cukup baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Tahun 2017 Jaringan irigasi di Kabupaten Tabanan 60% dalam kondisi rusak merata di seluruh wilayah. Jaringan irigasi terpanjang berada di wilayah utara Tabanan sepanjang 769,8 m atau 34,6%; di wilayah selatan sepanjang 730 m atau 31,81%; dan di wilayah barat sepanjang 725,10 atau 32,59% dari keseluruhan panjang irigasi di Kabupaten Tabanan. Kondisi haringan Irigasi Kabupaten Tabanan 2017.

Tabel 3.11 Kondisi Jaringan Irigasi Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2017

| No. | Kecamatan | Jaringan Irigasi (m) | | | | |
|-----|-----------------|----------------------|-------|--------------|--------------|-------------|
| | | Total Panjang | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat |
| 1 | Selemadeg Barat | 110,5 | 44,2 | 16,575 | 27,625 | 22,1 |
| 2 | Selemadeg | 183,6 | 73,44 | 27,54 | 45,9 | 36,72 |
| 3 | Selemadeg Timur | 237,9 | 95,16 | 35,685 | 59,475 | 47,58 |

| No. | Kecamatan | Jaringan Irigasi (m) | | | | |
|-----|---------------|----------------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Total Panjang | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat |
| 4 | Kerambitan | 237,6 | 95,04 | 35,64 | 59,4 | 47,52 |
| 5 | Tabanan | 201,1 | 80,44 | 30,165 | 50,275 | 40,22 |
| 6 | Kediri | 291,3 | 116,52 | 43,695 | 72,825 | 58,26 |
| 7 | Marga | 230 | 92 | 34,5 | 57,5 | 46 |
| 8 | Baturiti | 197,8 | 79,12 | 29,67 | 49,45 | 39,56 |
| 9 | Penebel | 431,4 | 172,560 | 64,71 | 107,85 | 86,28 |
| 10 | Pupuan | 103,7 | 41,480 | 15,555 | 25,925 | 20,74 |
| | JUMLAH | 2225 | 890 | 333,7 | 556,2 | 445 |

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, 2017

3.10.3 Air Minum

Untuk Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Kabupaten Tabanan dengan indikator Persentase layanan air minum kabupaten: 80% di tahun 2018, baru dapat dipenuhi sebesar 77%. Dengan melihat target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum dengan dengan capaian 81,77% di tahun 2019 kiranya memungkinkan untuk dicapai di tahun 2019.

Dalam rangka pemenuhan SPM di bidang air minum di samping dilayani dari PDAM untuk wilayah perkotaan, untuk layanan perdesaan, yang sudah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat melalui PAM Desa, dan juga melalui Program Pamsimas yang sudah dilaksanakan dari tahun 2014 – 2019, dengan jumlah desa penerima program 56 (lima puluh enam) Desa, dan Hibah Air Minum Perdesaan yang didanai melalui dana pusat maupun APBD, baru dapat menyelesaikan sebagian kecil (beberapa dusun) di suatu desa, sehingga dibutuhkan pendanaan lanjutan untuk pemenuhan cakupan layanan di perdesaan. Dari beberapa desa yang sudah terlayani air minum di tiap kecamatan, beberapa kecamatan cakupan air minumnya 100% yaitu Kecamatan Tabanan, Selemadeg, dan Kecamatan Kediri, sedangkan kecamatan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan yaitu Kecamatan Baturiti (62,45%), Selemadeg Barat (73,12%), Kerambitan (75%), Selemadeg Timur (86,82%), Pupuan (90,12%), Marga (92,00%) dan Kecamatan Penebel (93,65%).

3.10.4 Air Limbah

Sektor Sanitasi di Kabupaten Tabanan dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Kabupaten Tabanan dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang telah diikuti sejak tahun 2010. Sebagai gambaran pelaksanaan sub sektor air limbah melalui pencapaian akses jamban

sehat di Kabupaten Tabanan sampai dengan tahun 2018, akses jamban sehat sudah mencapai 97,54%. Hal ini pula menunjukkan target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pengelolaan air limbah yang memadai yang dilihat dari presentase jumlah penduduk terlayani tangki septik/MCK Komunal/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) terpusat terhadap jumlah total penduduk. Dengan target SPM sebesar 60% di tahun 2019, kiranya pencapaian SPM di sektor air limbah sudah melampaui target yang ditetapkan.

Selain pembangunan jamban sehat di tiap individu masyarakat, pemenuhannya dilakukan juga melalui pembangunan IPAL Komunal. Pembangunan IPAL Komunal di Kabupaten Tabanan telah dimulai sejak tahun 2007. Dari tahun 2007 - 2018 sudah terbangun 60 (enam puluh) unit IPAL Komunal yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan.



Gambar 3.5 IPAL Komunal di Kabupaten Tabanan

Dalam pembangunan IPAL Komunal di Kabupaten Tabanan dipenuhi melalui APBN yaitu dana reguler Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP), DAK maupun Hibah JICA. Dari sebaran IPAL Komunal di atas dapat dilihat bahwa jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Tabanan yang mencapai 32 unit yaitu sejumlah 53,33% diikuti oleh Kecamatan Kediri (15 unit) dan Marga (4 unit). Sebaran IPAL Komunal ini masih terfokus di wilayah perkotaan yaitu Perkotaan Tabanan (Kecamatan Tabanan dan Kediri), hal ini dikarenakan di kecamatan tersebut merupakan wilayah padat penduduk dan area beresiko sanitasi. Di samping itu, beberapa IPAL Komunal yang dibangun berada di kawasan kumuh yang tersebar di 7 (tujuh), sedangkan 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Selema deg Barat, Selema deg Timur dan Kecamatan Baturiti belum ada terbangun IPAL komunal, krn sebagian besar masyarakat menggunakan IPAL setempat (tangki septik).

Selain pembangunan IPAL Komunal, pelayanan sektor air limbah di Kabupaten Tabanan juga dipenuhi melalui pembangunan jamban sehat yang

tersebar di seluruh kecamatan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun berkolaborasi oleh masyarakat, serta pada tahun 2017 sudah terbangun 1 (satu) unit IPAL Kawasan berlokasi di Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken untuk pelayanan di wilayah perkotaan Tabanan.

Dari pelayanan sektor air limbah ini, beberapa desa di Kabupaten Tabanan sudah dapat memenuhi kriteria *ODF (Open Defecation Free)*- Bebas Buang Air Besar Sembarangan, dari 133 Desa sampai dengan tahun 2018, sudah tercatat 18 (delapan belas) desa sudah berstatus *ODF (Open Defecation Free)* dan diharapkan dapat diikuti oleh desa-desa lainnya di seluruh Kabupaten Tabanan.

3.10.5 Perumahan Rakyat

Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menyangkut (a). penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan (b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten, sampai saat ini belum terdapat kondisi sebagaimana tersebut di atas.

Penyelenggaraan perumahan Kabupaten Tabanan dilaksanakan melalui penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan hasil pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tabanan, sampai dengan tahun 2018 terdapat 2.836 unit RTLH yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan. Penyediaan rumah layak huni dapat dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah maupun pembangunan baru. Pada tahun 2016-2018 melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui pendanaan pusat yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah dapat ditangani 1.207 unit rumah tidak layak huni yang menyangkut 3 (tiga) kecamatan di 17 desa, Oleh karena itu untuk menuntaskan RTLH diperlukan inovasi, strategi dan kebijakan yang tepat dan sumber pendanaan lain, serta perlu diupayakan pendanaan melalui program pusat maupun *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

3.10.6 Pertanahan

Salah satu kendala dalam urusan pertanahan yaitu belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah yang memicu sengketa atas lahan. Hal ini menunjukkan pentingnya melakukan sertifikasi terhadap tanah yang dimiliki sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Permasalahan ini telah dijawab oleh pemerintah melalui Program Prioritas Nasional yaitu Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau sering diistilahkan sertifikasi tanah. Program ini adalah proses pendaftaran tanah yang dilakukan serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam satu wilayah (desa/kelurahan) sehingga pada nantinya akan memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

Program ini telah dilaksanakan secara bertahap di Kabupaten Tabanan dimana Kabupaten Tabanan mendapat target 67.000 bidang yang disertifikasi, dan sampai dengan awal 2019 telah 32.000 bidang sudah menjadi sertifikat hal milik baik perseorangan maupun desa pakraman. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerjasama dari Badan Pertanahan Nasional, masyarakat, Perbekel dan Camat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan seperti batas desa. Untuk permasalahan Batas Desa sebenarnya tinggal disosialisasikan ke tingkat kecamatan dengan Desa mengenai Batas Desa yang telah ditetapkan oleh BIG. Terkait dengan kepemilikan asset yang perlu segera dituntaskan untuk mewujudkan tertib administrasi bagi kepemilikan tanah dan membuatkan 1 sistem.

3.11 Sektor Perhubungan

Sektor perhubungan merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan selain dapat memperlancar arus barang dan jasa serta angkutan penumpang, juga meningkatkan produktifitas kerja dan meningkatkan aksesibilitas daerahdaerah terisolir serta menunjang pertumbuhan dan percepatan pengembangan sektor lainnya. Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan juga bertujuan untuk menciptakan transportasi yang berkeselamatan.

Tabel 3.12 Jenis Dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tabanan Tahun 2015 – 2017

| No. | Jenis Kendaraan | Tahun | | |
|-----|--------------------------------------|------------------------------|--------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Mobil Penumpang | | | |
| | Sedan | 170 | 170 | 155 |
| | Suburban | 1 | 0 | 0 |
| | Microlet | 111 | 123 | 114 |
| | Latihan mengemudi | 2 | 2 | 2 |
| | Angkutan pariwisata | 517 | 488 | 290 |
| | Jumlah | 801 | 783 | 561 |
| 2 | Mobil Bus | | | |
| | Micro Bis Umum | 99 | 95 | 117 |
| | Micro Bis tidak Umum | 2 | 5 | 17 |
| | Bis Umum | 136 | 141 | 108 |
| | Bis Tidak Umum | 6 | 5 | 5 |
| | Jumlah | 243 | 246 | 247 |
| | Total angkutan umum penumpang | 1.044 | 1.029 | 808 |
| 3 | Mobil Barang | | | |
| | Pick-up umum | | | 0 |
| | Pick-up tidak umum | 7.082 | 6.956 | 6.602 |
| | Truk ringan umum | 297 | 304 | 275 |
| | Truk ringan tidak umum | 594 | 583 | 549 |
| | Truk sedang umum | 1.665 | 1.464 | 1.409 |
| | Truk sedang tidak umum | 276 | 288 | 307 |
| | Truk berat umum | 314 | 315 | 282 |
| | Truk berat tidak umum | 11 | 10 | 11 |
| | Tangki umum | 25 | 21 | 25 |
| | Tangki tidak umum | 0 | 2 | 2 |
| | Kereta tempelan | 1 | 1 | 1 |
| | | Total angkutan barang | 10.265 | 9.944 |

Sumber : BPS Tabanan Dalam Angka Tahun 2018

Untuk pemerataan transportasi khususnya untuk angkutan siswa, Kabupaten Tabanan telah mengembangkan angkutan siswa yaitu Program Trans SERASI yang mulai dioperasikan pada tahun 2014. Cakupan layanan Trans Serasi meliputi 7 Kecamatan dengan jumlah armada 80 kendaraan kecil (MPU), 63 Bus Kecil dan 3 Bus Sedang.

| Tahun | Jumlah Kecamatan yang dilayani | Jumlah Armada | Siswa yang terangkut (orang) |
|-------|--------------------------------|---|------------------------------|
| 2014 | 1 | 57 armada angkutan kota | 125.419 |
| 2015 | 1 | 70 armada angkutan kota | 629.337 |
| 2016 | 4 | 80 armada angkutan kota, 3 bus sedang, 4 bus kecil; | 902.150 |
| 2017 | 7 | 80 armada angkutan kota , 60 bus kecil, 3 bus sedang; | 2.449.475 |
| 2018 | 7 | 80 armada angkutan kota (MPU), 63 bus kecil dan 3 bus sedang. | 2.778.467 |

Tabel 3.13 Jumlah Armada Trans Serasi

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tabanan, 2019

Dengan beroperasinya program Trans Serasi di Kabupaten Tabanan sejak 2014-2018, mampu meningkatkan jumlah penggunaan angkutan umum/siswa sampai dengan 6.884.848 orang. Dengan adanya program Trans Serasi memberikan dampak yang sangat positif antara lain: mampu menurunkan angka kecelakaan bermotor; mampu mengurangi penggunaan kendaraan di bawah umur bagi siswa sekolah; serta memberikan rasa aman bagi orang tua siswa. Keberhasilan ini menjadikan program unggulan yang banyak diterapkan oleh kabupaten di Bali, disamping itu banyaknya permintaan akan layanan Trans Serasi di wilayah yang belum mendapatkan pelayanan serupa.

4. PENUTUP

Permasalahan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah adalah rendahnya sinergitas dan harmonisasi kinerja pembangunan daerah (eksekutif) dengan target kinerja DPRD (legislatif). Hal ini terjadi karena kurangnya sinkronisasi arah dari prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Tabanan. Berdasarkan dengan kondisi dan fakta yang terjadi maka ide perubahan sebagai solusi inovatif adalah sesuai tupoksi Sekretaris DPRD adalah Membangun strategi sinkronisasi peningkatan kinerja Eksekutif dan Legislatif menuju era baru pariwisata Tabanan (JEMBATAN BIROKRASI).

Dengan JEMBATAN BIROKRASI ini, kondisi yang diharapkan adalah optimalisasi sinergi dan harmonisasi kinerja pembangunan daerah (Eksekutif) dengan target kinerja DPRD (Legislatif) yang dituangkan dalam Dokumen JEMBATAN BIROKRASI Strategi Sinkronisasi Peningkatan Kinerja Eksekutif dan Legislatif Menuju Era Baru Pariwisata Tabanan.

Strategi tersebut diharapkan mampu menjembatani program-program Eksekutif dan legislatif yang mencakup seluruh kepentingan masyarakat Tabanan.

BUPATI TABANAN



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

| MISI | BIDANG | SUB BIDANG | MENU | TABANAN | KERAMBITAN | SELEMADEG TIMUR | SELEMADEG | SELEMADEG BARAT | PUPUAN | PNEBEL | BATURITI | KEDIRI | MARGA |
|---|---|--|---|---------|------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|---------|----------|--------|-------|
| Misi 2. MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN AKSES DAN PELAYANAN PRIMA | 6. KESEHATAN | PELAYANAN DASAR | Prog. Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| | | | Prog. Pengembangan Lingkungan Sehat | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| | | | Prog. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| | | | Prog. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| | | JKN-Penerima Bantuan Iuran Daerah (UHC) | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| | 7. PERTANIAN | POTENSI PERTANIAN | Program Pengembangan Pertanian Organik; | | 2; 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1; 3 | | 3 | 2; 4 |
| | | | Program Peningkatan Produksi Padi; | 4; 5 | 2; 4 | 2 | | | 1; 3 | | | | |
| | | | Program Peningkatan Produksi Hortikultura; | 2 | | | 4; 5 | 4; 5 | 5 | 1; 3 | 1; 3 | | 2 |
| | | SAPRAS PERTANIAN | Program Pengembangan Taman Teknologi Pertanian (TTP); | | | | | | 1; 2; 3; 4; 5 | | | | |
| | | | Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Petani; | | 3 | | | 2; 4 | 1; 3; 5 | | | 5 | 2; 4 |
| Program pelestarian dan perlindungan Plasma Nutfah. | | | | | 5 | 4 | 2; 4 | 1; 2; 3 | 3 | | | | |
| PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN | | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; | | 2; 3 | 1 | 1; 3 | 1; 3 | 1; 3; 5 | 2; 4; 5 | 2; 4; 5 | 2; 4; 5 | 4 | |
| PEMASARAN HASIL PERTANIAN | | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; | 4 | 4 | 1; 4 | 1; 4 | 1; 2 | 1; 2 | 2; 3; 5 | 2; 3; 5 | 3; 5 | 3; 5 | |
| | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; | | | 1; 2; 4 | 1; 2; 4 | 1; 2; 4 | 1; 2; 4 | 3; 5 | 3; 5 | 3; 5 | 3; 5 | | |

| MISI | BIDANG | SUB BIDANG | MENU | TABANAN | KERAMBITAN | SELEMADEG TIMUR | SELE MADEG | SELEMADEG BARAT | PUPUAN | PENEHEL | BATURITI | KEDIRI | MARGA |
|---|---------------------|-----------------------------|---|---------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------|---------|-------|
| | | UMKM | Program Fasilitasi Pemasaran Produksi Petani dan UMKM; | | | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | | | |
| | | | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; | | | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | | | |
| | | | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM; | | | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | | | |
| | | | Program Peningkatan SDM UMKM; | | | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | | | |
| | 10. MASYARAKAT DESA | BUMDES | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (BUMDes) | 5 | 1; 2; 3 | 1; 2; 3 | 1; 2; 3 | 1; 2; 3 | 1; 2; 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| | | INFRASTRUKTUR DESA | Program pembangunan infrastruktur perdesaan | 2; 4; 5 | 1; 3 | 1; 3; 5 | 2; 4 | 2; 4; 5 | 1; 3; 5 | 1; 3; 5 | 2; 4 | 1; 3 | 2; 4 |
| Misi 4. MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH MELALUI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR | 11. INFRASTRUKTUR | JALAN | Program Peningkatan Jalan Kabupaten | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| | | | Program Pembangunan Jalan baru kabupaten | | | | | | 2; 3 | 2; 3 | | | |
| | | | Program Pembangunan Jembatan Baru | | 2 | | | 3 | 2; 3 | 2; 3 | 3 | | |
| | | IRIGASI | Program pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Air | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| | | AIR MINUM | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum | 2; 3 | 5 | 1; 2 | | 3; 4; 5 | 1; 2 | 2; 4 | 1; 2; 3 | 5 | 2 |
| | | AIR LIMBAH | Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah | 1; 2; 3 | 1; 4 | 3 | 2; 3 | 1 | 2; 3 | 1 | 1 | 2; 3; 4 | |
| | | DRAINASE | Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | | PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Program Pengembangan Perumahan | 3 | 2; 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | | 5 |
| | | PRASARANA PUBLIK | Program peningkatan prasarana aparatur dan prasarana publik | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |

| MISI | BIDANG | SUB BIDANG | MENU | TABANAN | KERAMBITAN | SELEMADEG TIMUR | SELE MADEG | SELEMADEG BARAT | PUPUAN | PENEBEL | BATURITI | KEDIRI | MARGA |
|------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | PERTANAHAN | Penyelesaian Masalah pertanahan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| | 12. LINGKUNGAN HIDUP | LIMBAH | | | | | | | | | | | |
| | | SAMPAH | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; | 1; 2; 4 | 2 | 3 | 3; 5 | | | 5 | | 1; 2; 4 | |
| | | | Program Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat; | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5 |
| | | SANITASI | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan IPLT. | 1; 2; 4 | | | 5 | | | | | 3; 5 | |
| | | pengendalian Lingkungan Hidup | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 1; 2; 4; 5 | 4 | | 5 | | | 4; 5 | 1; 2; 4 | 1; 2 | |
| | | | Program Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup | 1; 2; 5 | | 4 | 4 | | | | 1; 2; 5 | 1; 2; 5 | 1; 2; 4 |
| | | RTH | Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1; 2; 4; 5 | 3; 4; 5 | | | | | | | 1; 2; 3; 5 | |
| | 13. PERHUBUNGAN | FASILITAS KESELAMATAN JALAN | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 5 | 5 | 2 | 1; 4 | 1 | 2 | 3 | 3; 4 | | 4 |
| | | | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas | 5 | 5 | 1 | | 2 | 1 | 3 | | 3; 4 | 4 |

Keterangan :

Angka 1 menunjukkan prioritas pada tahun 2020 Prioritas  pertama
 Angka 2 menunjukkan prioritas pada tahun 2021 Prioritas  kedua
 Angka 3 menunjukkan prioritas pada tahun 2022 Prioritas  ketiga
 Angka 4 menunjukkan prioritas pada tahun 2023 Prioritas  keempat
 Angka 5 menunjukkan prioritas pada tahun 2024 Prioritas  kelima